

**STRATEGI ADVOKASI LABOR RIGHTS PROMOTION  
NETWORK DALAM UPAYA MENYELAMATKAN PEKERJA**

**MIGRAN DARI *MODERN SLAVERY* DI SEKTOR  
PERIKANAN THAILAND**

**TAHUN 2014 - 2018**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Politik pada Program Studi Hubungan Internasional Dalam Bidang  
Peminatan *International Security and Peace***

oleh :

**AISYAH ZARDI**

**135120401111074**



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Strategi Advokasi Labor Rights Promotion Network dalam Upaya  
Menyelamatkan Pekerja dari *Modern Slavery* di Industri Perikanan Thailand  
Tahun 2013 – 2018

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Aisyah Zardi

135120401111074

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama,

Lia Nihlah N, S.IP., M.Si  
NIK. 2009068305212001

Pembimbing Pendamping,

Primadiana Yunita, S.IP., M.A  
NIP. 199006202019032023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt  
NIP. 197802202010121001

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt  
NIP. 197802202010121001



HALAMAN PENGESAHAN

Strategi Advokasi Labor Rights Promotion Network dalam Upaya  
Menyelamatkan Pekerja dari *Modern Slavery* di Industri Perikanan Thailand  
Tahun 2014 – 2018

SKRIPSI

Disusun Oleh:  
Aisyah Zardi  
135120401111074

Telah dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada tanggal 7 Januari 2020

Ketua Majelis Penguji,



Joko Purnomo, S.IP., M.A  
NIP. 197804012009121002

Sekretaris Majelis Penguji,



Wishnu Mahendra W, S.IP., M.Si  
NIK. 20171089062810001

Anggota Majelis Penguji I,



Lia Nihlah N, S.IP., M.Si  
NIK. 2009068305212001

Anggota Majelis Penguji II,



Primadiana Yunita, S.IP., M.A  
NIP. 199006202019032023

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludgdo, SE., M.Si., Ak.<sup>2</sup>  
NIP. 196908141994021001

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS**

Nama : Aisyah Zardi

NIM: 135120401111074

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “STRATEGI ADVOKASI LABOR RIGHT PROMOTION NETWORK DALAM UPAYA MENYELAMATKAN PEKERJA MIGRAN DARI MODERN SLAVERY DI SEKTOR PERIKANAN THAILAND TAHUN 2014 - 2018” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya penulis, dalam skripsi ini diberi tanda catatan kaki dan dicantumkan di dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hak milik skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Malang, 29 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,

 Aisyah Zardi

NIM. 135120401111074



*“As long as you  
still experience the  
stars as something  
above you, you still  
lack a viewpoint of  
knowledge”*

- Friedrich Neitzsche

**ABSTRAK**

Sebuah paparan media global besar-besaran tentang Perbudakan Hari Modern di dalam Industri Makanan Laut Thailand senilai tujuh miliar dolar pada pertengahan 2014 mengungkapkan fakta pahit tentang asal-usul makanan laut sebelum berakhir di piring kita. Pekerja di kapal penangkap ikan dipukuli sampai mati, beberapa dari mereka dipaksa bekerja 20 jam sehari, tujuh hari seminggu, tanpa jaminan kesehatan atau kesempatan untuk melarikan diri. Pemerintah Militer Thailand, yang baru saja berkuasa setelah kudeta militer ke-14 pada tahun 2014, merespons dengan meletakkan upaya mengakhiri perbudakan sebagai prioritas nasional. Tetapi masalah ini telah terjadi selama lebih dari satu dekade, pemerintah memang melakukan beberapa upaya untuk memperkuat hukum dalam mengelola pekerja tetapi masih kurang dalam hal praktikal dan pertimbangan berdasarkan fakta. Labor Rights Promotion Network (LPN) adalah salah satu NGO lokal terkemuka Thailand yang mengadvokasi hak-hak pekerja, khususnya di industri perikanan. LPN melihat upaya tidak efektif yang dilakukan oleh pemerintah sebagai hambatan untuk menyelamatkan lebih banyak pekerja dari perbudakan. Penelitian ini akan menjelaskan strategi mereka dalam mengadvokasi hak-hak pekerja di industri makanan laut Thailand menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional oleh Keck dan Sikkink.

Kata kunci: perbudakan modern, kerja paksa, perdagangan orang, Industri Perikanan Thailand, Labor Rights Promotion Network, Jaringan Advokasi Transnasional

**ABSTRACT**

*Seven billion dollar worth Thailand Seafood Industry in mid 2014 exposed a bitter fact about the origin of the seafood before it was placed on our plate. Workers in the fishing boats got beaten to death, some of them were forced to work 20 hours a day, seven days in a week, with no health insurance nor a chance to escape. The Thai Military Government, who just came in power after the 14th military coup in 2014, responded by putting ending slavery effort in the national priority. But this act has been happening for more than a decade, the government did put some efforts to strengthen the law in managing workers but still lack of practical effort and real measurements. Labour Rights Promotion Network (LPN) is one of Thai leading local NGO who advocate worker rights, specialA massive global media exposure about Modern Day Slavery inside the fishing industry. LPN see the uneffective effort made by the government as an obstacle to safe more workers from slavery. This research will explain their strategy in advocating worker rights in Thai seafood industry using the concept of Transnational Advocacy Networks by Keck and Sikkink.*

*Keywords: Modern Slavery, Forced Labour, Human Trafficking, Thailand Seafood Industry, Labor Rights Promotion Network, Transnational Advocacy Networks*



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Studi Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Konseptual .....	17
2.2.1 <i>Transnational Advocacy Networks (TANs)</i> .....	17
2.2.2 Taktik Jaringan Advokasi Transnasional .....	23
2.3 Alur pemikiran .....	33
2.4 Argumen Utama .....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	36



3.4	Teknik Analisa Data.....	37
3.5	Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB IV .....</b>		<b>40</b>
<b>Gambaran Umum Sektor Perikanan Thailand, Kondisi Pekerja Migran Sektor Perikanan dan Eksistensi Jaringan LPN di Skala Domestik &amp; Internasional.....</b>		
		<b>40</b>
4.1	Sektor Perikanan Thailand .....	40
4.2	<i>Modern Slavery</i> di Thailand .....	46
4.3	Jaringan Labor Right Promotion Network (LPN).....	49
4.2	Peran Media dalam Upaya Perlindungan Pekerja Sektor Perikanan .....	60
<b>BAB V.....</b>		<b>63</b>
<b>Srategi Advokasi Jaringan LPN dalam Upaya Menyelamatkan Pekerja Migran dari <i>Modern Slavery</i> di Sektor Perikanan Thailand Tahun 2014 -201863</b>		
5.1	<i>Information Politics</i> .....	67
5.2	<i>Symbolic Politics</i> .....	72
5.3	<i>Leverage Politics</i> .....	74
5.4	<i>Accountability Politics</i> .....	79
5.5	Implikasi TAN terhadap Kebijakan Pemerintah Thailand .....	82
<b>BAB VI.....</b>		<b>85</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>85</b>
6.1	KESIMPULAN .....	85
6.2	SARAN .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Boomerang Pattern ..... 22

Gambar 2. *Thailand global capture production* ..... 41

Gambar 3. Peta Garis Pantai Thailand ..... 43

Gambar 4. Jabaran Hasil Tangkapan Komersil ..... 44

Gambar 5. Pola Boomerang dalam Kasus Modern Slavery ..... 65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Penelitian Penulis .....15

Tabel 2.2 Indikator Konsep Transnasional Advocacy Network. Olahan Penulis

Berdasarkan Konsep TAN oleh Margaret E. Keck dan Kathyryn Sikkink28

Tabel 5.1 Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Thailand 2014-2018.....83



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di dalam kajian Hubungan Internasional, negara selalu dilihat sebagai aktor yang memainkan peran krusial dalam pencarian kekuasaan, melakukan peperangan dan upaya-upaya mencapai kepentingan nasional. Berakhirnya perang dingin menjadi momentum perubahan dan perkembangan politik global yang ditandai dengan munculnya aktor-aktor non negara yang ikut memberikan pengaruh terhadap penentuan sikap negara. Hubungan internasional tidak lagi dilihat sebagai interaksi antar negara tetapi juga meliputi interaksi negara dengan aktor-aktor non negara maupun aktor non negara dengan sesamanya.<sup>1</sup> Kemunculan aktor-aktor non negara dibarengi dengan berkembangnya isu-isu non-konvensional seperti Hak Asasi Manusia (HAM), Gender, Kelompok Marginal dan Lingkungan.

Masalah pelanggaran HAM dialami oleh hampir semua negara di dunia, namun istilah *modern slavery* atau perbudakan modern memiliki terminologi berbeda di beberapa area. *The Walk Free Foundation* menjabarkan tiga jenis tindak kejahatan yang masuk ke dalam perbudakan modern diantaranya, *Trafficking in Persons, Slavery and Slavery Like Practice* dan *Forced Labour*.

Aktifitas perdagangan orang sangat erat kaitannya dengan perbudakan atau kerja paksa, *International Labour Organization* (ILO) mencatat ada sekitar 25 juta pria,

<sup>1</sup> Rousenau, James, N, dan Czempiel, Ernst-Otto., (1992), *Governance without Government: Order and Change in World Politics*. Hal. 17

wanita dan anak-anak yang masuk ke dalam *forced labour* atau kerja paksa.<sup>2</sup>

Korban yang terlibat ke dalam perbudakan modern biasanya jauh dari perhatian publik dan sangat sulit untuk diidentifikasi.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut *Intrernational Labour*

*Organization* (ILO), sebagai organisasi internasional yang fokus menangani

masalah pekerja mengeluarkan ILO *Convention No. 29*, konvensi ILO yang

paling banyak diratifikasi oleh negara – negara di dunia. Di dalam konvensi

tersebut, ILO menjelaskan *forced labour* sebagai seluruh aktivitas yang tidak

diinginkan dan dilakukan dibawah paksaan yang banyak terjadi di sektor

agrikultur, perikanan, pekerja domestik, konstruksi, manufaktur dan

pertambangan. Di tahun 2014, pihak pemerintah, perusahaan dan pekerja yang

tergabung ke dalam ILO *International Labour Conference* (ILC) mencetuskan

upaya baru untuk memerangi *forced labour*, perdagangan orang dan perbudakan.

Masing – masing perwakilan memberikan suara untuk mengadopsi sebuah

protokol yang mendukung *Forced Labour Convention, 1930*.<sup>3</sup> Protokol tersebut

berisikan instrumen yang akan mendorong negara untuk meningkatkan preventi,

proteksi dan upaya memenuhi seluruh komponen protokol untuk menekan *forced*

*labour*.

Berbagai negara telah menandatangani *Forced Labour Convention 1930*,

namun kompleksitas masalah *forced labour* dan jenis kejahatan terkait membuat

masalah tersebut sulit diselesaikan. *The Protocol on Forced Labour 2014*

menambahkan beberapa elemen seperti memasukkan akar masalah dalam

<sup>2</sup> International Labour Organization. *Strengthening the global fight against all forms of forced labour*.

<sup>3</sup> *Ibid*.

identifikasi kasus sehingga perbudakan dapat dieliminasi secara menyeluruh.<sup>4</sup> Protokol tersebut juga mengakui peran perusahaan dan pihak-pihak yang mempekerjakan sebagai aktor yang harus terlibat dalam upaya ini sehingga membantu perusahaan untuk melakukan prevensi dalam lingkungan kerja maupun rantai pasokan bahan mentah mereka. Dari hasil penghitungan suara di *International Labour Convergence* (ILC), 8 suara didapatkan dari perwakilan perusahaan dari Arab Saudi, Bahrain, Malaysia dan Slovenia sementara 4 suara lainnya dari perwakilan Thailand, 2 suara dari pemerintah militer, satu suara dari perusahaan dan satu dari pekerja. Melalui suara tersebut Thailand menolak ratifikasi protokol tersebut, diikuti dengan penolakan ratifikasi konvensi lainnya seperti ILO C.87 dan C.98 yang seharusnya mampu melindungi hak pekerja migran di sektor ekonomi Thailand yang *export-oriented*.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu negara *seafood exporter* terbesar di dunia dengan penghasilan sekitar \$7bn per tahun, perusahaan-perusahaan swasta di sektor perikanan memiliki peran penting dalam menyokong perekonomian Thailand.<sup>6</sup> Banyaknya permintaan terhadap produk *seafood* mendorong munculnya kebutuhan besar terhadap sumber daya manusia, sehingga sektor perikanan Thailand tidak hanya diisi oleh pekerja lokal Thailand namun juga menarik pekerja migran dari negara tetangga seperti Myanmar, Laos dan Kamboja.

<sup>4</sup> 50 for Freedom. *A treaty to Change 25 Million Lives*. Diakses dari <http://50forfreedom.org/the-protocol/> pada 9 Desember 2019.

<sup>5</sup> THE Fish Site, 17 Juni 2014, *Thailand Opposes International Efforts to Tackle Forced Labour*. Diakses dari <https://thefishsite.com/articles/thailand-opposes-international-efforts-to-tackle-forced-labour> pada 9 Desember 2019.

<sup>6</sup> The Guardian. 25 Februari 2015. *Slavery and trafficking continue in Thai fishing industry, claim activists* diakses dari <http://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/25/slavery-trafficking-thai-fishing-industry>

Menurut *The Global Slavery Index*, ada sekitar 450.000 – 500.000 orang yang masuk ke dalam perbudakan di Thailand, sementara 90% dari 300.000 orang yang bekerja di sektor perikanan merupakan pekerja migran.<sup>7</sup> Fakta tersebut ternyata tidak mampu mendorong pemerintah Thailand untuk mengambil kebijakan yang tepat.

Selama tiga tahun dari 2010 – 2013 Thailand berada di *Tier 2 Watch List* berdasarkan *Trafficking in Person Report* dan tidak banyak menunjukkan peningkatan dalam upaya mengeliminasi praktik perdagangan orang yang menjadi akar dari putaran kelam perbudakan modern. U.S Department state menyatakan bahwa kegagalan Thailand dalam menangani isu perdagangan orang mencakup kegagalan dalam investigasi, persekusi, menghapus korupsi dan memberi perlindungan terhadap korban.<sup>8</sup> Melalui investigasinya, *Environmental Justice Foundation* (EJF) menjelaskan beberapa fakta yang menunjukkan minimnya keinginan pemerintah Thailand dalam menangani kasus perdagangan orang.

Proses hukum bagi korban bisa memakan waktu hingga satu tahun atau lebih, dalam kurun waktu tersebut EJF menemukan adanya korban yang dipaksa bekerja untuk pihak kepolisian seperti melakukan renovasi kantor polisi. Fakta – fakta yang dilaporkan oleh EJF, media dan NGO lainnya tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah Thailand menetapkan isu perdagangan orang ke dalam prioritas nasional.

<sup>7</sup> US Department of State. *What is Modern Slavery?*. Diakses dari <https://www.state.gov/what-is-modern-slavery/#forced> pada 2 November 2019

<sup>8</sup> Environmental Justice Foundation, 2013, *Sold to The Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*.

Ketidakseriusan Thailand dalam menangani kasus perdagangan orang dan perbudakan sedikit banyak merupakan dampak dari keadaan politik domestik yang tidak stabil. Tahun 2014 menjadi momentum kemunduran demokrasi di

Thailand, dimana ruang gerak masyarakat, aktivis dan NGO semakin dibatasi.

Pada tanggal 22 Mei, kudeta militer ke 14 di Thailand berakhir dengan penetapan *National Council for Peace and Order* (NCPO) junta sebagai pemangku

kekuasaan. NCPO merepresi kebebasan berekspresi, membatasi kegiatan aktivisme, meredam media, menahan ratusan orang tanpa dakwaan dan mengadili warga sipil di pengadilan militer tanpa memberi hak untuk mengajukan banding.<sup>9</sup>

Banyak aktivis dan jurnalis yang yang terjerat dalam kasus hukum ketika berusaha meliput dan melakukan investigasi terkait isu perbudakan dan eksploitasi pekerja di Thailand.

Citra Thailand di mata dunia internasional semakin tercoreng akibat adanya *media exposure* besar – besaran di tahun 2014. *The Guardian*, media asal Inggris melakukan investigasi lebih lanjut terkait isu perbudakan di sektor perikanan Thailand dan menemukan fakta adanya perbudakan dibalik perusahaan *seafood* terbesar dunia, *Charoen Pokphan* (CP) *Food*. CP *Food*, merupakan penyedia produk udang untuk supermarket besar di Amerika Serikat dan Eropa seperti Walmart, Carrefour, Costco dan Tesco, CP *Food* mengakui adanya indikasi perbudakan dalam makanan udang yang dibeli dari kapal-kapal penangkap ikan yang mempekerjakan budak.<sup>10</sup> Pemberitaan tersebut mendapat

<sup>9</sup> Human Rights Watch, 2015, *World Report: Thailand*. Diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/thailand> pada 3 November 2019

<sup>10</sup> The Guardian, 10 Juni 2014, *Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK*. diakses dari <https://www.theguardian.com/global->



perhatian dunia terutama bagi konsumen produk CP Food sehingga muncul narasi - narasi yang meminta masyarakat dunia agar lebih sadar bahwa makanan yang ada di piring mereka bisa saja diproduksi oleh perbudakan dan membeli produk tersebut adalah bentuk dukungan terhadap perbudakan modern.

Sepuluh hari setelah pemberitaan *The Guardian*, Amerika Serikat menurunkan status Thailand ke dalam *tier 3*, tingkatan terendah di dalam *Trafficking in Persons (TIP) Report*.<sup>11</sup> Pemberitaan *The Guardian* menyebabkan *domino effect* dimana muncul banyak pemberitaan lanjutan dari media global seperti *The Bangkok Post*, *The Wall Street Journal*, *USA Today*, siaran BBC, Fox News dan *Voice of America*, serta investigasi lebih lanjut dari *Associated Press* dan *New York Times*.<sup>12</sup> Terlepas dari segala bentuk pemberitaan yang mengkritisi Thailand terkait *modern slavery*, pihak junta militer tetap memperjelas posisinya dengan tidak melakukan ratifikasi terhadap konvensi ILO. Tidak hanya media global dan organisasi internasional, *Civil Society Organizations (CSOs)* juga menekan pemerintah militer Thailand untuk mengambil langkah tegas dalam memperbaiki kondisi kerja di dalam sektor perikananannya.

Salah satu aktor yang berdiri bersama CSOs untuk melakukan upaya demi menyelamatkan pekerja di sektor perikanan Thailand adalah *Labor Rights Promotion Network (LPN)*. LPN merupakan NGO lokal yang menggunakan konsep jaringan untuk menyebarkan informasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran yang berpusat di Samut Sakhon, Thailand. LPN dibentuk oleh

---

[development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour](https://www.ub.ac.id/development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour) pada 20 Maret 2018

<sup>11</sup> U.S. Department of States, 2014, *Trafficking in Persons Report*. Hal 373

<sup>12</sup> Casting a Tight Net, diambil dari [https://ssir.org/articles/entry/casting\\_a\\_tight\\_net](https://ssir.org/articles/entry/casting_a_tight_net) diakses pada 18 Mei 2018

sekelompok aktivis yang bergerak dalam isu pekerja domestik dan pekerja migran, terutama di sektor perikanan Thailand. Tujuan LPN adalah meningkatkan kualitas hidup pekerja migran, melindungi hak-hak mereka dan memastikan mereka dapat hidup harmonis diantara masyarakat Thailand.<sup>13</sup> Namun tentunya tujuan ini tidak akan mampu dicapai tanpa adanya dukungan berupa perubahan kebijakan dan instrumen hukum yang tegas dari pemerintah Thailand.

Tidak seperti kelompok aktivis dan NGO di negara demokratis, LPN tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan protes maupun demo apalagi dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Penemuan fakta di lapangan tidak bisa dikomunikasikan dengan cara tertentu akibat adanya larangan terhadap segala bentuk aktivitas politik, pertemuan umum dan kebebasan berbicara. Pimpinan junta, Gen Prayut Chan-ocha memastikan tidak ada yang menentang dan mengkritisi Raja berikut seluruh komponen istana dan pemerintah junta melalui hukum *lese majeste*.<sup>14</sup> Untuk itu LPN sebagai aktor domestik lebih fokus pada upaya menyelamatkan sebanyak mungkin pekerja, merangkul sebanyak mungkin pihak dan menyajikan sebanyak mungkin data dengan harapan akan mendapat dukungan dari NGO dan media domestik maupun luar negeri yang memiliki tujuan serupa.

Upaya LPN berjejaring untuk memunculkan *domino effect* mulai memperlihatkan hasil yang positif ketika mendapat dukungan dari *European Union* (EU) yang mengeluarkan *yellow card* dan ancaman boikot terhadap impor

<sup>13</sup> *About Labour Rights Promotion Networks*. Diakses dari <https://www.lpnfoundation.org/about> pada 3 November 2019.

<sup>14</sup> Thailand 2014 Human Rights Report, diakses dari <https://www.state.gov/documents/organization/236692.pdf> pada tanggal 5 Desember 2018

produk Thailand akibat tidak kooperatif dalam melawan *illegal, unreported and unregulated* (IUU).<sup>15</sup> Peringatan tegas EU diikuti oleh tekanan – tekanan lain baik dari *level* domestik hingga internasional yang membuat Thailand mau tidak mau mulai menyikapi masalah *slavery* dan *forced labour* dengan lebih serius. *Military Government* Thailand mulai memperlihatkan peningkatan dalam upaya mengakhiri *slavery* sebagai prioritas nasional. Salah satu regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Thailand di skala domestik adalah sistem *Port in – Port Out* (PIPO) yang mengatur dan mendata kapal-kapal yang pulang – pergi dari dermaga – dermaga Thailand lengkap dengan pendataan kru kapal.

Perkembangan Thailand dalam menyikapi isu perbudakan modern juga mempengaruhi statusnya di mata publik internasional. Setelah diturunkan ke status terendah *tier 3* di *TIP Report* di tahun 2014 – 2015, status Thailand dinaikkan ke *tier 2 Watch List* di tahun 2016 – 2017 sebelum kemudian dinaikkan lagi ke *Tier 2* di tahun 2018.<sup>16</sup> Thailand kemudian menjadi negara Asia pertama yang meratifikasi *ILO's Protocol on Forced Labour Convention* di tahun 2018.

Perubahan sikap Thailand dari tidak kooperatif menjadi sangat kooperatif dan tegas dalam menangani perbudakan modern sedikit banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor non negara seperti IGO, NGO dan jaringan CSO yang ikut menyuarakan desakan untuk mencapai perubahan kebijakan. Jaringan CSO seperti *Labour Rights Promotion Network* (LPN) memainkan perannya sebagai aktor

<sup>15</sup> European Union Press Release, 21 April 2015, *EU acts on illegal fishing: Yellow card issued to Thailand while South Korea & Philippines are cleared*. Diakses dari [https://ec.europa.eu/fisheries/eu-acts-illegal-fishing-yellow-card-issued-thailand-while-south-korea-philippines-are-cleared\\_en](https://ec.europa.eu/fisheries/eu-acts-illegal-fishing-yellow-card-issued-thailand-while-south-korea-philippines-are-cleared_en) pada 3 November 2019

<sup>16</sup> The Bangkok Post, 10 September 2019. Diakses dari <https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1746594/ending-slavery-with-the-right-strategy> pada 5 Desember 2019.

dalam jaringan advokasi transnasional dan mempengaruhi sikap pemerintah Thailand demi menyelamatkan pekerja dari perbudakan di sektor perikanan milyaran dollar Thailand.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana strategi advokasi jaringan *Labor Rights Promotion Network* (LPN) dalam upaya menyelamatkan pekerja dari *modern slavery* di sektor perikanan Thailand tahun 2014 – 2018?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami strategi apa yang digunakan LPN dalam upaya menyelamatkan pekerja dari *modern slavery* di sektor perikanan Thailand tahun 2014 – 2018.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca terkait:

- a. Strategi advokasi apa yang digunakan oleh LPN dalam upaya menyelamatkan pekerja dari *modern slavery* di sektor perikanan Thailand.
- b. penggunaan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang dipopulerkan oleh Keck dan Sikkink, sehingga diharapkan dapat memperkaya referensi terkait aktor non negara dalam kajian Hubungan Internasional

c. Referensi bacaan advokasi transnasional oleh aktor non negara dan studi kawasan Asia tenggara khususnya negara Thailand.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Studi Terdahulu

Terdapat dua studi terdahulu yang digunakan penulis untuk membantu penulisan penelitian ini. Studi terdahulu pertama, penulis menggunakan sebuah jurnal tentang Jaringan Advokasi Transnasional yang ditulis oleh Arastri Putri Hartini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan judul **Keberhasilan *Transnational Advocacy Network* dalam Menekan *Multinational Corporation* Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997-2001**. Dari jurnal tersebut penulis dapat mempelajari penggunaan konsep *Transnasional Advocacy Networks (TAN)* secara mendalam karena Arastri menggunakan konsep TAN sebagai taktik yang digunakan oleh kelompok dan organisasi terkait untuk menekan para pemangku kekuasaan.

Jurnal tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan konsep *Transnational Advocacy Networks (TAN)* yang dipaparkan oleh Keck dan Sikkink, terdapat suatu keadaan dimana ketika suatu kelompok tidak mampu mengemukakan atau menuntut hak-haknya kepada pihak yang memiliki wewenang, maka akan timbul kecenderungan dimana kelompok tersebut akan berinteraksi dan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam maupun luar negeri untuk menyuarkan tuntutan dalam skala yang lebih besar. Keadaan tersebut juga kemudian membentuk *boomerang pattern* dimana kelompok-kelompok terkait tidak langsung menuntut kepada pemangku kebijakan, melainkan melibatkan

pihak-pihak lain dan pihak dari luar sehingga tekanan tidak hanya dari bawah ke atas, namun juga dari luar ke dalam.

Pada jurnal yang penulis jadikan sebagai acuan, studi kasus yang digunakan adalah konflik antara NGO yang bergerak pada isu lingkungan bernama SAMWU (*South African Municipal Workers Union*) yang melakukan penolakan terhadap perusahaan pemasok air bernama Biwater. Biwater adalah sebuah perusahaan pengolah limbah air yang berasal dari Inggris yang menjadi MNC (*Multi-National Cooperation*) kedua yang terbentuk di tahun 1994. Biwater mencoba mendapatkan kewenangan melakukan privatisasi air di Afrika Selatan, tepatnya di kawasan Nelspruit di tahun 1997. Biwater memasuki Afrika Selatan untuk bernegosiasi kepada pemerintah untuk melakukan privatisasi air dengan tujuan untuk melakukan perbaikan santasi air dan membantu perbaikan kondisi kesehatan yang didukung dengan penyaluran air bersih ke rumah-rumah warga.

Kehadiran Biwater kemudian mendapat penolakan dari *The South African Municipal Workers Union* (SAMWU), sebuah serikat pekerja terbesar di Afrika Selatan yang berjuang melawan upaya privatisasi tersebut karena dianggap telah menyebabkan banyak masyarakat harus kehilangan pekerjaannya dan berpotensi memperburuk layanan masyarakat. Menurut SAMWU, privatisasi akan merujuk pada penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan serta upaya-upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya. Untuk memperkuat tuntutan, SAMWU memberikan contoh di salah satu kawasan yang sektor airnya telah diprivatisasi oleh Biwater dan keadaan yang terjadi adalah

masyarakat setempat sulit mendapatkan air bersih yang sebelumnya dijanjikan.

SAMWU juga kemudian mengangkat kebijakan-kebijakan pemerintah Afrika

Selatan seperti *Water Service Act (WSA)* dan *National Water Act (NWA)* yang dikeluarkan di tahun 1998.

Pada jurnal tersebut Arastri mencoba menjelaskan bagaimana SAMWU memanfaatkan TAN atau Jaringan Advokasi Internasional untuk mendapatkan

dukungan dalam menekan perusahaan Biwater. Upaya SAMWU tersebut

dibuktikan dengan adanya dukungan dari media massa *online* seperti Mail dan

Guardian yang mempublikasikan artikel mengenai pergerakan perlawanan

SAMWU terhadap Biwater.<sup>17</sup> Sesuai dengan keadaan yang dideskripsikan oleh

Keck dan Sikkink bahwa terjadi *boomerang pattern* dalam upaya TAN

mengadvokasi tujuannya. Pada kasus ini SAMWU yang merupakan kelompok

masyarakat yang hanya berskala nasional tidak bisa dengan mudah menekan

sebuah korporasi multinasional yang memiliki *power* yang jauh lebih besar.

Untuk itu dengan adanya dukungan dari pihak-pihak luar yang melakukan aksi

kolektif maka tekanan yang diberikan kepada Biwater akan jauh lebih besar,

hingga mampu membuat Biwater berhenti beroperasi.

Studi terdahulu kedua yang digunakan penulis adalah sebuah *thesis* yang

ditulis oleh Hrishikesh Somani dengan judul *Seafood Industry in Thailand: A*

*Closer Look at the Supply Chain of Nestle's Seafood Sourcing in Thailand and*

*Critiquing its Labour Practices*. Dari studi terdahulu tersebut penulis mengambil

kesamaan dalam isu yang di angkat yaitu sama-sama membahas tentang isu

<sup>17</sup> Arastri Putri Hartini, 2015. Keberhasilan Transnational Advocacy Network dalam Menekan Multinational Corporation Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997–2001. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4, No.1, hal. 1423-1440



*Human Trafficking* dan *Labour Slavery*. Perbedaan penelitian yang penulis ambil dengan artikel ini adalah teori dan sudut pandang yang digunakan yaitu penulis menggunakan sudut pandang transnasional dengan menggunakan teori TAN sementara artikel tersebut menggunakan sudut pandang kritis terhadap *global policy and strategy* dalam praktek tenaga kerja di Industri *Seafood* Thailand. Pada pembahasan tesisnya Somani mencoba melihat dengan perspektif kritis terkait dengan fakta dimana perusahaan sebesar Nestle's mengeluarkan pernyataan bahwa adanya indikasi praktek perbudakan di dalam salah satu industri pemasok bahan dasar produknya di Thailand.

Sejak tahun 2014 Thailand telah menghadapi kritik dan peringatan dari beberapa NGO termasuk PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan EU (*European Union*) terkait dengan isu *human trafficking and slavery*. Pada tahun yang sama Nestle's melakukan *self-policing* setelah bekerjasama dengan Verite, sebuah organisasi dari Amerika Serikat yang mempromosikan keadilan bagi tenaga kerja.

Dari momentum tersebut, Somani mengkritisi langkah yang diambil Nestle dengan menganggapnya sebagai suatu bentuk *PR Gimmick* yang hanya membuat seolah-olah Nestle, sebagai perusahaan yang memiliki *supply chain* di Thailand ikut berkontribusi dalam menghentikan perbudakan di dalam industri pemasok bahan dasar *seafood* di Thailand. Untuk memperkuat kritiknya, Somani mengutip beberapa perencanaan kebijakan dari Nestle beberapa tahun terakhir dan membandingkannya dengan fakta bahwa Nestle membantah tuntutan tentang mempekerjakan anak di bawah umur dan perbudakan di Ivory Coast. Dari perencanaan tersebut Somani menilai Nestle tidak maksimal dalam

mengimplementasikan perencanaan dan kebijakannya dalam memperbaiki kondisi tenaga kerja, sedangkan dari langkah yang diambil oleh Nestle di Ivory Coast, Somani menganggap langkah tersebut kontradiktif dengan apa yang tertera dalam perencanaan sebelumnya.

Dari studi tersebut, penulis mendapatkan gambaran mengenai isu *human trafficking* dan *slavery* yang terjadi di Thailand dari sisi Nestle, yaitu perusahaan yang memiliki *supply chain* di Thailand. Sikap yang di ambil oleh Nestle adalah salah satu bentuk upaya dalam menanggulangi permasalahan tenaga kerja. Nestle sebagai perusahaan yang menggunakan bahan-bahan dari Thailand memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan yang dapat membantu menghentikan praktik *human trafficking* dan *slavery*. Dari rekomendasi yang dikemukakan oleh Somani juga dapat dipahami bahwa untuk menghentikan suatu permasalahan kompleks terkait isu *human trafficking* dan *slavery* dibutuhkan kerjasama dan aksi kolaboratif dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga perusahaan-perusahaan dan NGO yang terlibat di dalamnya.

Tabel 2.1 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Nama Peneliti	Arastri Putri Hartini Universitas Airlangga	Hrishikesh Somani University of California	Aisyah Zardi (Penulis)
Judul Penelitian	Keberhasilan <i>Transnational Advocacy Network</i> dalam Menekan <i>Multinational Corporation</i> Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997-2001	<i>Seafood Industry in Thailand: A Closer Look at the Supply Chain of Nestle's Seafood Sourcing in Thailand and Critiquing its Labour Practices</i>	<i>Strategi Labor Rights Promotion Network dalam upaya menyelamatkan pekerja dari Modern Slavery di Sektor Perikanan Thailand Tahun 2014 - 2018</i>
Isu yang diangkat	Aktivitas sebuah NGO yang bergerak pada isu	Kebijakan Nestle sebagai perusahaan	Advokasi oleh aktor transnasional terkait



	lingkungan bernama SAMWU ( <i>South African Municipal Workers Union</i> ) yang melakukan penolakan terhadap perusahaan pemasok air bernama Biwater.	yang memiliki <i>supply chain</i> di Industri <i>seafood</i> Thailand dalam merespon isu <i>Human Trafficking</i> dan <i>Modern Slavery</i>	upaya menyelamatkan pekerja dari <i>modern slavery</i> di sektor perikanan Thailand.
Teori yang digunakan	<i>Transnational Advocacy Networks</i> (TAN) yang dipaparkan oleh Keck dan Sikkink	Perspektif kritis dalam menganalisa respon perusahaan <i>Nestle</i> dalam menghadapi isu <i>human trafficking</i> dan <i>modern slavery</i> di dalam <i>supply chain</i> -nya di Thailand.	<i>Transnational Advocacy Networks</i> (TAN) yang dipaparkan oleh Keck dan Sikkink
Hasil Penelitian	Berhasil menjelaskan kegiatan dan pergerakan SAMWU dengan memanfaatkan Jaringan Advokasi Internasional untuk mengangkat isu privatisasi air dan mendapatkan dukungan dalam menekan perusahaan Biwater.	Mengkritisi apa yang dilakukan <i>Nestle</i> hanyalah <i>PR Gimmick</i> semata sebagai salah satu taktik untuk membersihkan nama perusahaan bukan benar-benar berupaya untuk memberantas isu <i>human trafficking</i> dan <i>modern slavery</i>	Menjelaskan kegiatan dan pergerakan LPN sebagai sebuah NGO yang memanfaatkan jaringan transnasional untuk mengadvokasi isu <i>modern slavery</i> yang terjadi pada pekerja di sektor perikanan Thailand.
Keterangan	Kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini kepada penulis adalah memberikan gambaran bagaimana sebuah NGO lokal dapat menekan dan mempengaruhi kebijakan dari perusahaan dengan cara mengangkat isu ke level yang lebih tinggi.	Kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini adalah memberikan informasi dan penjelasan bagaimana peran perusahaan dalam menanggulangi isu <i>human trafficking</i> and <i>modern slavery</i> di dalam industri <i>seafood</i> Thailand.	Dengan berpedoman pada dua studi terdahulu tersebut penulis melanjutkan penelitian berbeda dengan isu <i>modern slavery</i> yang dijelaskan dengan konsep <i>Transnational Advocacy Networks</i> milik Keck dan Sikkink.



## 2.2 Kajian Konseptual

### 2.2.1 *Transnational Advocacy Networks* (TANs)

Konsep *transnational advocacy network* (TANs) atau jaringan advokasi transnasional milik Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink digunakan sebagai konsep utama dalam penelitian ini dikarenakan mampu menjawab rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya. Menurut kamus *oxford*, advokasi diartikan sebagai dukungan publik yang diberikan untuk menyajikan tuntutan terhadap suatu isu atau permasalahan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Sedangkan di dalam jurnal yang berjudul *Advocacy's Place within Social Work Practice*, advokasi didefinisikan sebagai kegiatan yang mewakili pandangan dari individu, kelompok dan komunitas yang lebih besar yang dapat melibatkan kampanye tentang nilai-nilai kolektif. Advokasi juga dapat terlibat dalam proses menghimbau orang lain untuk berubah dan juga mengemukakan perspektif dari pelayanan dan memastikan pandangan tersebut didengar.<sup>18</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan suatu aktivitas menyuarakan suatu isu dan berusaha mempengaruhi individu maupun negara untuk membuat perubahan dalam bentuk pandangan maupun kebijakan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kampanye-kampanye kemanusiaan adalah sulitnya menyuarakan isu yang diangkat kepada pemangku kebijakan yang dapat membuat perubahan signifikan dalam ruang lingkup domestik. Kampanye kemanusiaan ataupun kampanye lingkungan mendukung dan menyuarakan tuntutan dari masyarakat lokal agar tuntutan tersebut

<sup>18</sup> *Advocacy's Place Within Social Work Practice*, diakses dari <https://www.mheducation.co.uk/openup/chapters/9780335243037.pdf> pada 20 Maret 2018

dipertimbangkan dan diikutsertakan di dalam proses pengambilan keputusan.

Sehingga ketika tidak ada komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, maka NGO lokal mencari jalan lain untuk mencari aliansi internasional untuk memberikan tekanan yang jauh lebih besar kepada pemerintah. Kembali lagi kepada globalisasi, selama bertahun-tahun perkembangan globalisasi mendukung perkembangan aliansi NGO dan masyarakat sipil dalam pemerintahan internasional dan proses pembuatan kebijakan. Sehingga tanpa disadari NGO dan masyarakat sipil yang diorganisir untuk mencapai tujuan publik juga telah menjadi pemain utama dalam pemerintahan internasional.<sup>19</sup> Aktor-aktor non-negara memilih untuk beraliansi karena jaringan akan memberikan mereka lebih banyak akses, pengaruh dan informasi yang belum tentu bisa mereka dapatkan jika melakukan advokasi sendiri.

Hubungan transnasional sendiri dapat diartikan sebagai hubungan antara aktor-aktor non negara, yaitu individu, kelompok akar rumput, organisasi, lembaga dan media massa, yang melewati lintas batas negara. Hal ini juga ditekankan oleh Gemmill dan Bamidele-Izu yang mengidentifikasi lima peranan masyarakat sipil yaitu (1) mengumpulkan, menyebarkan dan melakukan analisis terhadap informasi; (2) memberikan masukan dalam penetapan agenda dan proses pengambilan kebijakan pembangunan; (3) menjalankan fungsi operasional; (4) menilai kondisi lingkungan dan pemantauan kepatuhan perjanjian lingkungan

<sup>19</sup> L. David Brown, Sanjeev Khagram, Mark H. Moore & Peter Frumkin, *Globalization, NGOs and Multi Sectoral Relations*, (Harvard University, 2000) hal. 2

hidup, serta (5) melakukan advokasi keadilan lingkungan.<sup>20</sup> Pada hubungan transnasional ada kondisi dimana aktor-aktor yang saling terhubung merupakan suatu bentuk interaksi yang dikarenakan adanya upaya untuk mengadvokasi suatu isu tertentu. Oleh karena itu muncul *Transnational Advocacy Networks (TAN)* atau Jaringan Advokasi Transnasional, yaitu suatu bentuk interaksi dan hubungan yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara dengan organisasi internasional lainnya.

Pada bukunya, *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, Keck dan Sikkink mendefinisikan jaringan advokasi transnasional sebagai suatu jaringan yang terdiri dari aktor-aktor relevan yang bekerja dalam ruang lingkup internasional pada suatu isu, yang saling terikat oleh nilai-nilai bersama, bahasan umum, dan pertukaran informasi dan jasa.<sup>21</sup> Pada umumnya isu yang paling tepat untuk diangkat oleh jaringan tersebut adalah isu yang memiliki karakteristik konten nilai yang tinggi dan ketidakpastian informasi.

Tiga isu utama yang sering diangkat adalah isu kemanusiaan, lingkungan dan hak wanita, termasuk juga tentang kampanye-kampanye tentang hak mendasar, hak pekerja dan hak-hak minoritas. Meskipun isu yang dibahas berbeda, namun ada persamaan dari isu tersebut yaitu jika dilihat dari prinsip dan gagasan isu yang diangkat adalah permasalahan universal.

Inti dari hubungan transnasional ini adalah pertukaran informasi, yang unik dari jaringan ini adalah kemampuan para aktor non tradisional untuk memobilisasi informasi secara taktis untuk membantu membuat isu baru dan

<sup>20</sup> The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance

<sup>21</sup> Margaret E. Keck dan Kathyryn Sikkink, Op, Cit. Hal 2

untuk membujuk, menekan dan mendapatkan pengaruh dari pemerintah dan organisasi yang jauh lebih berkuasa.<sup>22</sup> Globalisasi adalah salah satu hal yang mendorong mudahnya jaringan ini terbentuk setelah teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat dan memudahkan akses terhadap informasi bagi siapapun. Internet adalah salah satu hal yang paling sering digunakan untuk menyebarkan informasi dan melakukan kampanye secara *online*. Kini siapapun bisa menjadi bagian dari jaringan advokasi internasional karena siapapun yang dapat mengakses informasi dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam mengangkat permasalahan tertentu.

Tujuan dari jaringan advokasi transnasional adalah untuk mempengaruhi kebijakan, namun tidak hanya itu, mereka juga ingin merubah cara pandang seseorang terhadap suatu isu. Untuk merubah perilaku suatu negara dan organisasi internasional mereka melakukan *framing* terhadap isu-isu yang ingin diangkat untuk membuat isu tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat, untuk menarik perhatian, mendorong aksi dan juga untuk dapat cocok di dalam ruang-ruang institusi.<sup>23</sup> Aktor yang ada pada jaringan membawa ide-ide baru, norma dan suatu bahasan ke dalam pembuatan kebijakan dan juga dijadikan sebagai sumber informasi dan testimoni. Mereka juga mempromosikan norma-norma dalam implementasi, dengan cara menekan aktor yang ditargetkan untuk mengadopsi suatu kebijakan dan mengawasi kepatuhan mereka terhadap standar internasional.

Advokasi memperlihatkan keunggulan tersendiri dari jaringan transnasional yaitu, mereka terorganisir untuk mempromosikan suatu isu, ide,

<sup>22</sup> Ibid hal 2

<sup>23</sup> Margaret E. Keck dan Kathyryn Sikkink, Op, Cit. Hal 2-3

gagasan dan norma, mereka juga dapat terlibat secara individual dalam mengadvokasi perubahan kebijakan. Aktor-aktor utama dalam jaringan advokasi adalah: (1) lembaga atau organisasi advokasi dan riset non negara domestik maupun internasional (NGO); (2) gerakan sosial lokal; (3) yayasan; (4) media; (5) gereja, serikat perdagangan, organisasi konsumen dan para intelektual; (6) *intergovernmental organization* regional dan internasional dan; (7) cabang-cabang lembaga eksekutif dan/atau cabang-cabang parlemen dari pemerintahan.<sup>24</sup> Tidak semua aktor tersebut akan ada di setiap jaringan advokasi, NGO internasional dan domestik memainkan peran utama dalam seluruh jaringan advokasi karena mereka yang biasanya menginisiasi suatu aksi dan memberi tekanan pada aktor-aktor yang memiliki kekuasaan untuk ikut mengambil posisi.

TAN membawa fakta-fakta beserta suara publik ke ranah internasional agar isu atau permasalahan tersebut dapat didengar dan diperhatikan oleh pemangku kebijakan.<sup>25</sup> Keunikan cara advokasi dan pengangkatan isu membuat jaringan ini menjadi semakin penting untuk dikaji. Keck dan Sikkink menjelaskan tiga kondisi bagaimana *transnational advocacy network* dapat terbentuk. Pertama, ketika komunikasi antara kelompok domestik dengan pemerintah terhambat atau tidak ada akses untuk membawa isu ke pemerintah domestik sehingga mendorong kelompok untuk menggunakan “pola boomerang” sebagai alternatif penyampaian isu. Keck dan Sikkink menjelaskan “*boomerang pattern*” yaitu pola yang digunakan oleh TAN sebagai cara alternatif untuk mendapatkan dukungan dan

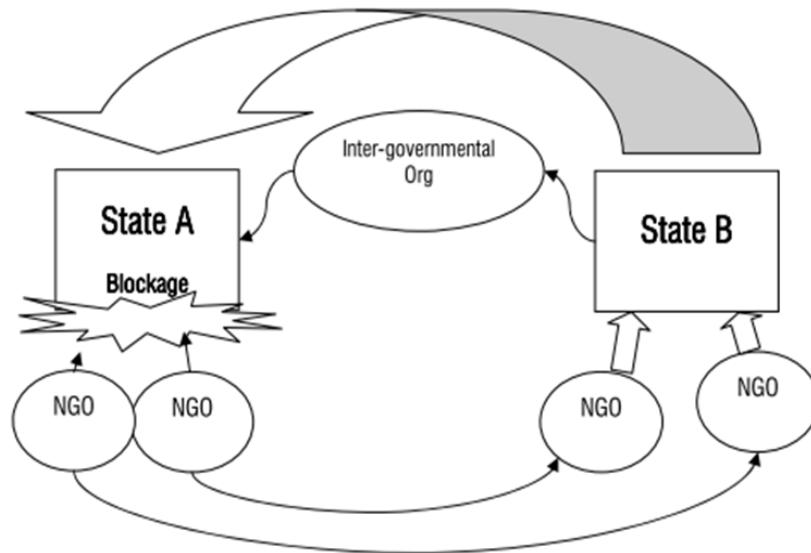
<sup>24</sup> Margaret E. Keck dan Kathyryn Sikkink, Op, Cit. Hal 9

<sup>25</sup> Margaret E. Keck dan Kathyryn Sikkink, Op, Cit. Hal 9



memperkuat tekanan kepada pemerintah dengan memanfaatkan aktor-aktor internasional yang lebih besar untuk membawa isu yang diperjuangkan.

Gambar 1. Boomerang Pattern



(Sumber: Activist Beyond Border)

Pola *boomerang* menggambarkan bagaimana interaksi antar aktor yang bermain dalam TAN dengan satu tujuan yaitu memberi tekanan pada pemerintah domestik. Pada bagan dapat dilihat ketika keadaan negara A tidak memungkinkan bagi NGO lokal untuk mendapatkan akses dan mempengaruhi kebijakan negara maka NGO negara A menjalin komunikasi dan kerjasama dengan NGO di negara B. Kemudian NGO yang ada di negara B mempengaruhi pemerintahnya dan masyarakat publik untuk mendengarkan permasalahan yang diangkat sehingga muncul respon publik maupun kebijakan dari negara B. Respon tersebut yang akan dimanfaatkan untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah negara A. Bentuk pola tersebut terjadi ketika avokasi dilakukan oleh TAN, namun



aktor yang terlibat akan berbeda pada setiap kasus. Pola yang terbentuk akan membantu TAN dalam mencapai tujuannya mengangkat suatu permasalahan.

Keadaan lain yang mendorong munculnya jaringan advokasi transnasional adalah ketika aktivis dan kelompok domestik percaya bahwa berjejaring akan memperluas misi dan kampanye mereka sekaligus mempromosikan jaringan tersebut secara aktif. Alasan lainnya adalah ketika ada konferensi internasional, bentuk lain dari kontak lanjutan adalah dengan membuat arena atau wadah untuk membentuk dan memperkuat jaringan itu sendiri.<sup>26</sup> Ketika akses terhadap partisipasi domestik terhambat maka arena internasional menjadi satu-satunya tempat bagi para aktivis domestik untuk mempromosikan tujuan yang mereka bawa.

### 2.2.2 Taktik Jaringan Advokasi Transnasional

Dalam hubungan internasional, aktor non negara memiliki kelemahan karena tidak memiliki kewenangan sebesar pemerintah negara untuk membuat perubahan atau kebijakan, untuk itu aktivis dan kelompok domestik perlu mengatur strategi untuk mencapai tujuan yang dibawanya. Keck dan Sikkink berusaha melihat bagaimana NGO bekerja dan berusaha mencari pengaruh dalam penyelesaian kasus yang mereka bawa. Karena tidak memiliki *power* dalam konteks tradisional maka mereka harus menyusun strategi dengan memanfaatkan kekuatan informasi, perputaran ide dan simbol-simbol yang relevan dengan masyarakat untuk mendapat dukungan. Keck dan Sikkink menjabarkan dalam strategi TAN, ada empat taktik yang dapat digunakan oleh jaringan dalam proses

<sup>26</sup> Margaret E. Keck dan Kathyryn Sikkink, Op, Cit. Hal 12

advokasi yaitu; *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics* dan *Accountability Politics*.<sup>27</sup>

a. *Information Politics* dapat dipahami sebagai suatu kemampuan dan kredibilitas suatu aktor dalam menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada jaringannya. Informasi menjadi hal paling penting untuk mengkomunikasikan *shared value* yang mempersatukan sebuah jaringan transnasional. Dalam mengolah informasi, aktor TAN dapat menggunakan fakta, data testimoni dan opini (cerita-cerita yang disampaikan oleh individu yang hidupnya dipengaruhi oleh isu yang diangkat) dari saksi dan juga korban. Informasi tersebut kemudian dibungkus dengan raph (*framing*) dan disampaikan secara formal maupun informal, dalam bentuk laporan, esai, artikel, film, email atau telepon. *Framing* dilakukan untuk mempermudah pemahaman informasi dan untuk menghimbau atau menstimulasi aktor target agar ikut mendukung isu yang diangkat.

b. *Symbolic Politics* atau politik simbol merupakan sebuah taktik yang mendorong aktor TAN untuk menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan, atau cerita-cerita yang dapat membantu masyarakat luas dalam memahami isu. Penggunaan simbol dan bentuk-bentuk universal akan mengatasi perbedaan bahasa dan budaya, sehingga setiap orang bisa mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan isu yang dibicarakan.

Ketika informasi dibungkus menggunakan simbol, aksi maupun cerita

<sup>27</sup> Ibid.

yang *iconic*, maka informasi yang disajikan dapat mencapai siapapun dan dimanapun.

c. *Leverage Politics* merupakan proses persuasi dan pemberian tekanan kepada aktor – aktor di dalam jaringan maupun aktor target (pemerintah, perusahaan, institusi) agar merubah kebijakan atau sikap mereka terkait isu. Jaringan biasanya menggunakan aktor-aktor yang memiliki *power* lebih besar dari aktor target agar dapat memberi pengaruh dan tekanan yang lebih besar.<sup>28</sup> Pengaruh yang diberikan kepada aktor target dapat berbentuk *material* atau *moral leverage*. Pengaruh dalam hal material contohnya aktor yang dapat mempengaruhi perekonomian aktor target dengan melakukan boikot impor, pemberhentian pendanaan, atau hal material lainnya. Sementara *Moral leverage* diberikan oleh aktor-aktor yang mampu memberikan sorotan internasional kepada aktor target atau juga dikenal dengan istilah *mobilization of shame* dimana aktor yang menjadi sasaran akan dikecam atas perilakunya yang tidak memenuhi tuntutan.

d. *Accountability Politics* atau politik akuntabilitas adalah penggunaan pernyataan-pernyataan resmi dari aktor target yang digunakan aktivis dan jaringan untuk membuktikan konsistensi aktor target dalam menjaga perubahan sikap atau kebijakannya. Hal ini dilakukan untuk memberi jaminan agar aktor target terus mendukung isu yang diangkat, karena tidak jarang persetujuan yang diberikan aktor target hanya sebatas ucapan verbal

<sup>28</sup> Ibid.

atau sebuah formalitas dalam forum. Untuk itu perlu adanya akuntabilitas dalam menjamin keberlangsungan jaringan karena perilaku yang tidak ditunjukkan oleh aktor target akan berpengaruh pada kebijakan jangka panjang dan prinsip yang telah mereka ambil.

Itulah keempat taktik yang dapat digunakan untuk menganalisa proses advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Transnasional atau TAN dalam mengangkat sebuah isu minoritas menjadi isu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Keberhasilan dari TAN dapat diukur dari berhasilnya sebuah isu yang pada awalnya hanya menjadi permasalahan domestik kemudian menjadi permasalahan mayoritas yang harus diketahui oleh masyarakat internasional. Untuk melihat pengaruh dan pencapaian TAN, Keck dan Sikkink mengidentifikasi lima jenis tahapan yaitu; (1) dengan membingkai sebuah perdebatan dan menghasilkan isu dalam agenda; (2) dengan mendorong komitmen diskursif dari aktor negara dan aktor-aktor kebijakan lainnya; (3) dengan menghasilkan perubahan prosedural di tingkat domestik maupun internasional; (4) dengan mempengaruhi kebijakan negara dan pemangku kekuasaan lainnya; (5) dengan mempengaruhi perilaku dan membawa perubahan sikap pada aktor-aktor yang menjadi target dari advokasi itu sendiri.

### 2.3. Operasionalisasi Konsep

Sesuai dengan penjabaran pada kerangka konseptual, penulis menurunkan konsep TAN menjadi empat variabel sesuai dengan keempat taktik TAN yang dijelaskan sebelumnya. Variabel *Information Politics* diturunkan ke dalam tiga indikator yaitu (1) adanya pengelolaan informasi berupa fakta dan opini, (2)

adanya *framing* terhadap data, (3) adanya arus pertukaran informasi dalam bentuk formal dan informal. LPN sebagai NGO lokal melakukan pengumpulan data berupa fakta dan opini dari kasus yang mereka tangani untuk kemudian dibingkai sebaik mungkin sebelum disampaikan kedalam jaringan. Informasi tersebut kemudian dijadikan landasan kekuatan jaringan untuk meningkatkan kesadaran publik, mengarahkan opini publik, mempengaruhi pihak-pihak yang memiliki wewenang dan menekan negara untuk segera mengambil tindakan yang tegas.

Variabel kedua, *Symbolic Politics*, dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu (1) adanya penggunaan simbol, aksi maupun cerita, (2) adanya penyajian isu secara singkat ke dalam bahasa yang mudah dipahami, (3) adanya unsur himbauan secara dramatis untuk mencuri perhatian publik dimanapun mereka berada. Dalam operasionalisasi variabel ini, LPN menggunakan sosok simbolik seperti founder dan korban yang berhasil diselamatkan untuk menceritakan kasus-kasus perbudakan yang terjadi di industri *seafood* Thailand. Penggunaan simbol dan cerita kemudian diolah ke dalam bentuk film dan infografis yang membantu masyarakat global untuk memahami isu yang diangkat dengan narasi dan visualisasi yang mudah dimengerti.

Untuk variabel ketiga, *Leverage Politics*, dapat diturunkan ke dalam dua indikator yaitu (1) adanya keterlibatan aktor yang dapat memberi pengaruh atau tekanan secara material (uang, barang, kedudukan dan sebagainya) dan (2) adanya keterlibatan aktor yang dapat memberi pengaruh dan tekanan secara moral berupa sorotan internasional atau *mobilization of shame*. Dalam kasus *modern slavery*, tekanan diberikan kepada pemerintah Thailand tidak hanya secara moral yaitu

kecamatan internasional dan penurunan ke *tier 3* dalam *Trafficking in Persons Report* oleh Amerika Serikat namun juga secara materil berupa ancaman boikot produk *seafood* Thailand oleh *European Union*.

Variabel terakhir, *Accountability Politics*, diturunkan ke dalam dua indikator yaitu (1) adanya perubahan sikap dan kebijakan yang ditunjukkan oleh aktor-aktor di dalam jaringan dan juga aktor yang menjadi target, (2) adanya monitoring oleh jaringan dan upaya untuk mempertahankan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan agar tetap konsisten dalam mendukung isu yang diangkat, sehingga akan berpengaruh pada kebijakan jangka panjang dan prinsip yang telah mereka ambil. Dalam proses advokasinya, LPN terus melakukan komunikasi dan melakukan kerjasama dengan aktor-aktor pendukung, pemerintah lokal dan aparaturnegara untuk mencapai konsistensi dalam kampanye kasus *modern slavery*. LPN bersama jaringannya juga melakukan pengawalan kebijakan yang diambil oleh negara, atau pemerintah Thailand, menganalisa kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi.

Tabel 2.2. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<b>Transnasional</b>	<b>Information</b>	Adanya	LPN melakukan investigasi dan operasi penyelamatan bersama <i>Associated Press</i> di tahun 2015 dan membongkar fakta 2000 pekerja migran yang dieksploitasi di perairan sekitar Ambon dan Benjina.
<b>Advocacy Network</b>	<b>Politics</b>	informasi berupa fakta dan opini	



		LPN dan jaringannya menyediakan data, laporan dan hasil survey sebagai bahan publikasi dan konsumsi publik terkait isu <i>modern slavery</i> di sektor perikanan Thailand.
	Adanya <i>framing</i> atau pengolahan terhadap data	Hasil investigasi, survey dan operasi penyelamatan kemudian disajikan melalui rangkaian artikel berjudul <i>Seafood from Slave</i> yang dipublikasikan di situs <i>Associated Press</i> . Narasi yang dibangun adalah mengingatkan konsumen, perusahaan dan pemerintah bahwa produk makanan laut yang ada di piring kita bisa saja merupakan hasil tindak perbudakan sehingga secara tidak langsung setiap orang punya potensi mendukung tindak perbudakan modern.
	adanya arus pertukaran informasi dalam bentuk formal	Penyampaian informasi dilakukan LPN dan jaringan secara formal yaitu melalui riset, laporan



		dan informal.	investigasi, pernyataan sikap dan sebagainya, kemudian secara informal yaitu melalui presentasi, film dokumenter, newsletter dan infografis.
		Adanya pemanfaatan media (artikel, surat, video, sosial media)	Dalam
	<i>Symbolic Politics</i>	Adanya penyajian isu secara singkat ke dalam bahasa yang mudah dipahami.	LPN mengolah isu ke dalam infografis, slogan, video singkat dan artikel singkat yang mudah dipahami oleh semua orang.
		Adanya unsur himbauan secara dramatis untuk mencuri perhatian publik dimanapun mereka berada.	LPN menggunakan aksi simbolik untuk menghimbau masyarakat internasional, negara, NGO, INGO dan kelompok lainnya untuk ikut mengkampanyekan isu yang diangkat sehingga bisa ditanggapi oleh pemerintah Thailand.
	<i>Leverage Politics</i>	Adanya keterlibatan aktor yang	LPN bersa Jaringan mengkampanyekan isu dan menyediakan data



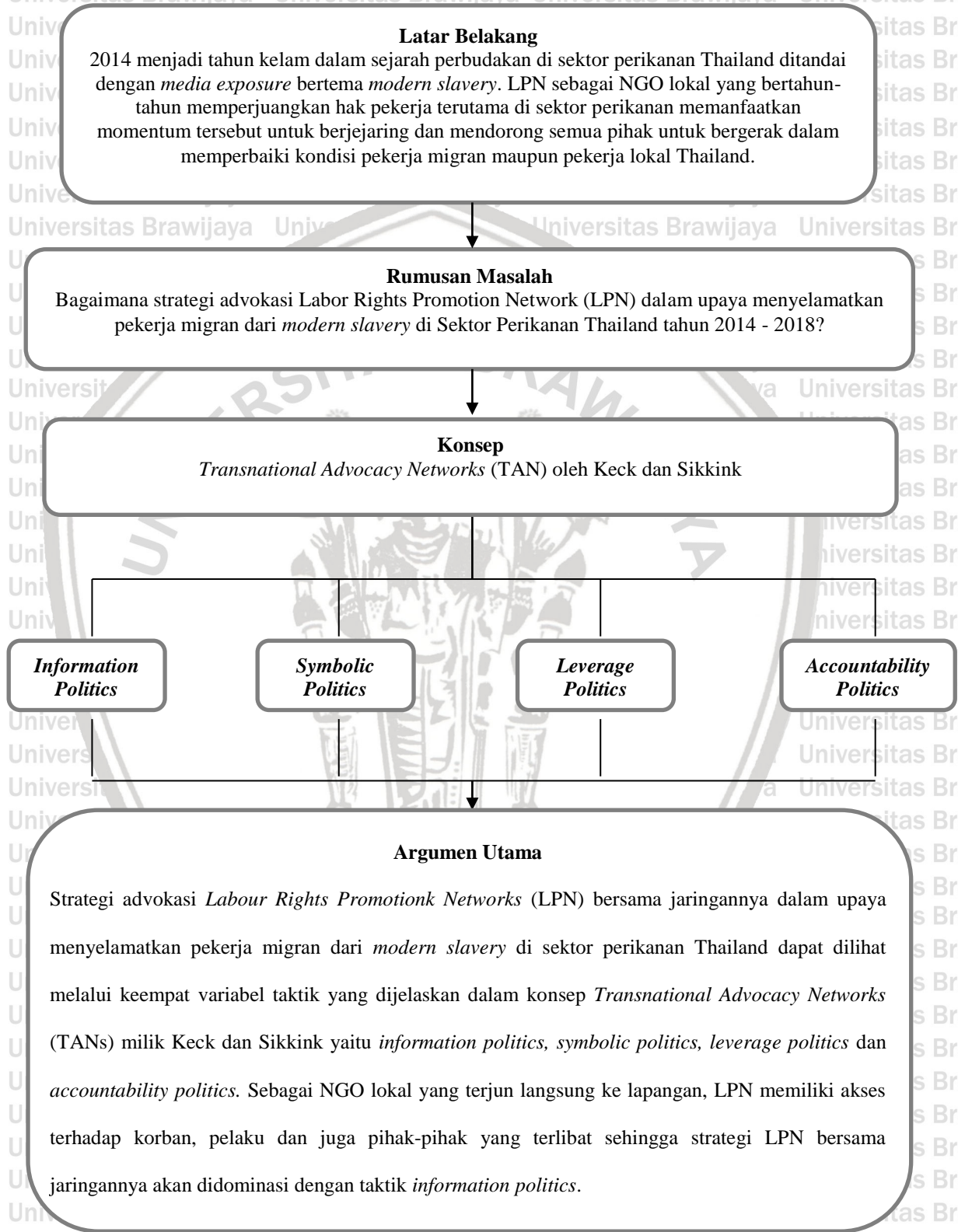
		memberi pengaruh material.	sehingga mendapatkan dukungan dari <i>European Union</i> dalam bentuk ancaman boikot produk <i>seafood</i> Thailand apabila pemerintah Thailand tidak mengambil langkah tegas untuk membersihkan industri mereka dari perbudakan.
		Adanya keterlibatan aktor yang memiliki pengaruh moral.	Jaringan merangkul pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan sanksi moral dengan diturunkannya Thailand ke <i>tier 3</i> dalam TIP Reports.
Accountability Politics		Adanya perubahan sikap dan kebijakan yang ditunjukkan oleh aktor-aktor di dalam jaringan dan juga aktor yang menjadi target	Pemerintah Thailand melakukan amandemen terhadap “Anti-Trafficking Act” di tahun 2015 dan 2017 dan kebijakan lainnya untuk menghapuskan perbudakan modern.
		Adanya monitoring oleh jaringan dan upaya untuk	LPN bersama jaringan secara kontiniu meng- <i>update</i> perkembangan kasus <i>modern slavery</i> di



	mempertahankan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan agar tetap konsisten dalam mendukung isu yang diangkat	industri <i>seafood</i> Thailand dan mngawasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Thailand dalam menghapuskan perbudakan modern di sektor perikanan nya.
--	---	---



### 2.3 Alur pemikiran



## 2.4 Argumen Utama

Strategi advokasi yang digunakan oleh aktor - aktor jaringan *Labor Rights Promotion Network* (LPN) dalam upaya menyelamatkan pekerja migran di sektor perikanan Thailand dapat dilihat melalui empat variabel yang diturunkan dari konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs) milik Keck dan Sikkink yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*. LPN, sebagai NGO lokal yang berjejaring dengan aktor – aktor transnasional memiliki kesempatan untuk mendorong pemerintah Thailand untuk mengeluarkan kebijakan dan program yang mampu membantu upaya penyelamatan pekerja dari *modern slavery*. Dari keempat taktik tersebut, LPN akan lebih banyak menggunakan *information politics*, memanfaatkan kapabilitasnya sebagai yayasan yang memiliki akses terhadap korban dan pihak-pihak yang terlibat kasus *modern slavery*. Pasca pemberitaan besar – besaran oleh media global, Thailand berada di dalam kecaman dunia internasional, momentum ini dimanfaatkan oleh LPN untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya penyelamatan dan menyajikan fakta yang ditemui di lapangan sebagai upaya mempengaruhi pengambilan kebijakan Pemerintah Thailand.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dengan judul “Strategi *Labour Rights Promotion Network* (LPN) dalam upaya menyelamatkan pekerja migran dari *modern slavery* di sektor perikanan Thailand ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara mendalam (*in-depth*) dan fokus pada kasus tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang strategi, aktivitas dan upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor TAN dalam mengadvokasi isu *modern slavery* yang terjadi di sektor perikanan Thailand. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan bagaimana sebuah NGO lokal, LPN, dengan segala keterbatasannya berusaha berjejaring dan mencari dukungan dari NGO, Organisasi Internasional, Media dan aktor transnasional lainnya untuk memberikan pengaruh dan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah Thailand dalam pengambilan kebijakan terkait kasus perbudakan modern.

### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan agar pembahasan dari penelitian ini tidak terlalu jauh dan keluar dari kerangka permasalahan. Penelitian ini akan dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami dengan berfokus pada strategi yang digunakan oleh LPN bersama jaringan advokasi transnasional dalam mengadvokasi isu perbudakan modern untuk memberikan tekanan dan pengaruh kepada pemerintah Thailand. Ruang lingkup penelitian ini akan penulis batasi dari

momentum selesainya kudeta militer ke-14 Thailand dan awal terungkapnya isu *modern slavery* di mata dunia melalui pemberitaan media global di tahun 2014 hingga ratifikasi ILO *Forced Labour Convention* yang dilakukan pemerintah Thailand di tahun 2018. Batasan waktu ini ditentukan karena penulis mengklaim bahwa pemerintah Thailand meratifikasi ILO *Convention* dan mengamandemen *Anti-Trafficking Act* sebanyak dua kali akibat tekanan dari LPN beserta aktor transnasional lainnya.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumen dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data studi pustaka dilakukan melalui pencarian sumber tertulis. Sumber tertulis tersebut dapat berupa buku, jurnal, publikasi media, koran, serta studi pustaka mengenai data dan informasi yang mampu menggambarkan aktivitas dan taktik yang digunakan LPN dan aktor-aktor TAN dalam mengadvokasi isu *modern slavery* di industri *seafood* Thailand dari tahun 2014-2018. Teknik ini juga mengolah data dalam bentuk tabel, grafik maupun angka ke dalam uraian yang berbentuk kalimat. Penulis mengambil data sekunder di beberapa lokasi terutama di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya, situs-situs pemerintah, NGO, INGO, IGO, dan portal-portal berita media masa yang memiliki kredibilitas yang tervalidasi.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu tahap interpretasi yang diawali dengan proses observasi. Analisa data dilakukan menggunakan konsep dan variabel yang telah ditentukan penulis dalam penelitian.

Teknik analisa data ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu, klasifikasi data, seleksi data, perbandingan data dan analisa atau interpretasi terhadap data yang telah di seleksi. Kemudian penulis menyusun data hasil penelitian dengan menggunakan teori atau konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis akan menganalisis, membandingkan dan menginterpretasikan aktivitas LPN dalam kasus *modern slavery* sebagai bentuk strategi untuk menekan pemerintah Thailand dengan menggunakan variabel *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*. Untuk mempermudah pengolahan data/pembahasan kasus, penulis akan menyajikan data kronologis kasus dan gambaran umum dari NGO.

### 3.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk program studi hubungan internasional, penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab utama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, analisis, dan penutup

#### 1. BAB 1 - PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang perlunya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.



## 2. BAB 2 – TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kerangka konseptual, yaitu teori atau konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam pengkajian dan analisa masalah.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) milik Keck dan Sikkink yang memiliki empat variabel. Keempat variabel tersebut kemudian dioperasionisasikan ke dalam kasus yang dibahas dalam penelitian. Pada

akhir bab, penulis juga menuliskan alur pemikiran lengkap dengan argumen utama, yaitu mengenai pandangan penulis berdasarkan konsep terhadap kasus yang dibahas.

## 3. BAB 3 – METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan metode-metode yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan pengkajian masalah, diantaranya adalah jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta sistematika penulisan.

## 4. BAB 4 – GAMBARAN UMUM

Bab ini akan membahas aktor dalam advokasi kasus *modern slavery* di industri *seafood* Thailand dengan LPN sebagai aktor utamanya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa LPN dalam melakukan misinya memanfaatkan *transnational advocacy networks* (TAN) untuk menekan pemerintah Thailand.

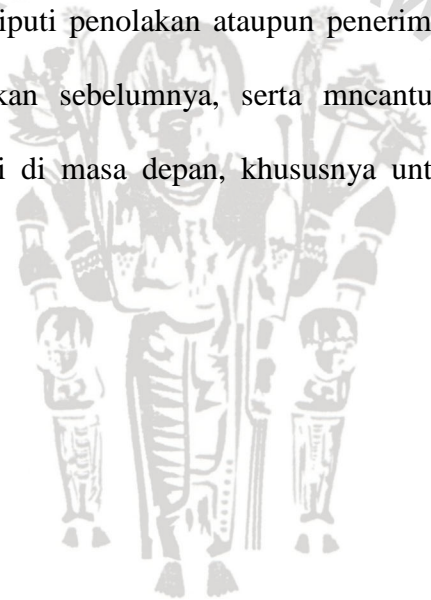
## 5. BAB 5 – ANALISIS

Pada bab ini, penulis akan memberikan penjabaran yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah berdasarkan konsep yang digunakan.

Penulis akan menganalisis aktivitas yang dilakukan LPN terkait dengan kasus *modern slavery* di industri *seafood* Thailand untuk menentukan strategi dan taktik yang digunakan LPN.

## 6. BAB 6 – PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, meliputi penolakan ataupun penerimaan argumen utama yang telah dirumuskan sebelumnya, serta mncantumkan rekomendasi bagi peneliti-peneliti di masa depan, khususnya untuk penelitian dengan isu yang sama.



## BAB IV

### Gambaran Umum Sektor Perikanan Thailand, Kondisi Pekerja Migran Sektor Perikanan dan Eksistensi Jaringan LPN di Skala Domestik & Internasional

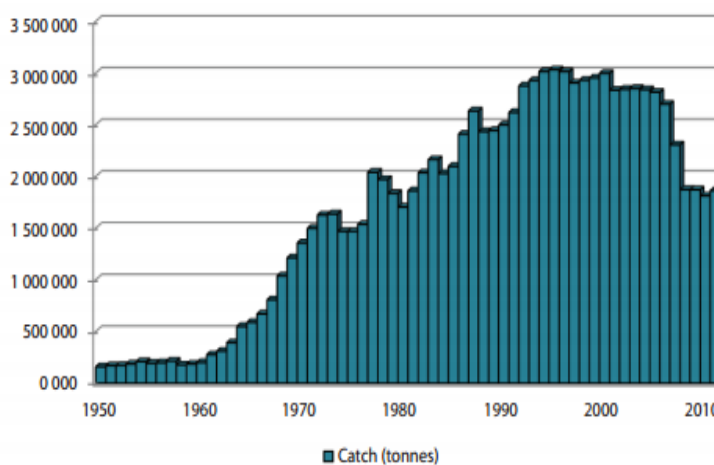
#### 4.1. Sektor Perikanan Thailand

Wilayah Thailand adalah salah satu *growth area* yang menjadi pusat perkembangan ekonomi dan kooperasi terbesar di dunia yang dulu dikenal dengan istilah *Greater Mekong Sub-Region*.<sup>29</sup> Dengan wilayah pinggir laut seluas 2.700 km, Thailand berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan industri perikanan terbesar di wilayah Asia. Pada tahun 1969 tercatat sekitar 2.600 kapal penangkap ikan yang terdaftar pada pemerintah, setelah diberlakukannya sistem pukat yang diperkenalkan oleh nelayan Filipina melalui inisiasi Thailand-Jerman, tercatat ada sekitar 11.000 kapal penangkap ikan di tahun 1982.<sup>30</sup> Sistem tersebut menuai kesuksesan besar ditandai dengan data hasil tangkapan Thailand yang meroket di sekitar tahun 1990an hingga 2000an. Peningkatan tersebut sangat membantu perubahan besar-besaran dalam industri *seafood* Thailand dan di tahun 2013 Thailand tercatat sebagai negara pengimpor *seafood* terbesar ketiga di dunia dengan penghasilan sekitar \$7bn per tahun.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Simmons. Jane J. 2003. *Human Security and Thai NGO & Governmental Roles*, diambil dari [http://www.aulibrary.au.edu/multiml/ABAC\\_Pub/ABAC-Journal/v23-n1-7.pdf](http://www.aulibrary.au.edu/multiml/ABAC_Pub/ABAC-Journal/v23-n1-7.pdf) diakses pada 15 mei 2018

<sup>30</sup>International Labour Organization. 2013. *Asian Research Center for Migration, Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*. Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University- Bangkok. p.10

<sup>31</sup>The Guardian: Slavery and trafficking continue in Thai fishing industry, claim activists <http://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/25/slavery-trafficking-thai-fishing-industry>

Gambar 2. Thailand global capture production.<sup>32</sup>

Source: FAO (2013)

Para ahli dari *World Fish Center* menyatakan bahwa sektor perikanan Thailand mengalami proses modernisasi dan industrialisasi sejak tahun 1970an dan 1980an yang berujung pada *overfishing*. Pertumbuhan tersebut juga berdampak pada proses produksi masing – masing industri perikanan, hadirnya teknologi yang lebih memadai, kekuatan finansial dan pergerakan membuat operasi penangkapan ikan skala besar menjadi kebal terhadap peraturan pemerintah. Pemerintah Thailand telah memberlakukan larangan penggunaan alat penangkap ikan tertentu untuk area 3 km dari garis pantai namun kebijakan yang tidak pas dan tidak koheren berkontribusi untuk penurunan drastis dalam sumber daya sektor perikanan. Sejak adanya deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari beberapa negara, area operasi kapal penangkap ikan Thailand semakin terbatas, namun tidak sedikit kru kapal Thailand yang tertangkap akibat melanggar batas

<sup>32</sup> International Labour Organization. 2013. *Asian Research Center for Migration, Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*. Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University- Bangkok. p.10

perairan negara asing, membuat banyak persengketaan antara sesama pekerja sektor perikanan di negara tetangga.

Secara geografis terdapat 23 provinsi yang memiliki garis pantai, membagi area sektor perikanan menjadi dua titik yaitu bagian teluk Thailand dan Laut Andaman. Area tersebut kemudian dibagi lagi menjadi lima zona perikanan secara administratif yang apabila dihitung dari batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Thailand, terhitung 420.280 km<sup>2</sup> area yang dapat dikuasai oleh sektor perikanan.

Area tersebut termasuk wilayah perbatasan laut dengan negara tetangga seperti Kamboja, Vietnam dan Malaysia. Sekitar 60% hasil tangkapan Thailand berasal dari area tersebut yang dijabarkan 41% ditangkap di wilayah teluk dan 19% ditangkap di wilayah laut Andaman, sementara sisanya ditangkap di laut internasional.

Permintaan hasil laut yang besar menyebabkan munculnya kompetisi dan eksploitasi sumber daya oleh masing – masing negara tetangga Thailand.

Meskipun pelanggaran penangkapan ikan melewati di area ZEE negara tetangga sudah berkurang sejak adanya perjanjian usaha perikanan bersama di tahun 1996, namun banyak kapal Thailand yang masih melewati batas ZEE negara lain.<sup>33</sup>

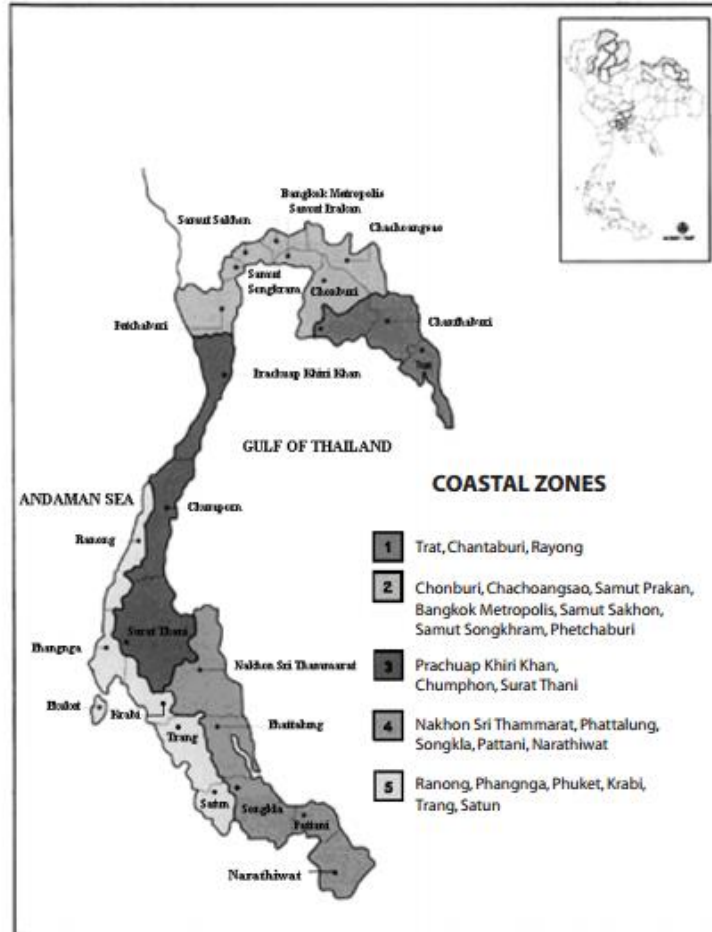
Beberapa pelabuhan terbesar Thailand dilihat dari kuantitas hasil tangkapannya diantara lain, Songkhla, Pattani, Samut Sakhon, Nakorn Si Thammarat dan Trat.

Sesuai dengan *Fisheries Act, B.E. 2490*, perairan Thailand dikelola sebagai sumber daya terbuka sehingga, setiap kapal penangkap ikan bisa membawa hasil tangkapan tidak hanya ke pelabuhan dimana kapal tersebut didaftarkan secara

<sup>33</sup> Ibid.

resmi tapi juga ke pelabuhan lain yang melintasi ZEE. Sehingga banyak kapal yang berpindah – pindah dari area teluk ke laut andaman maupun sebaliknya.

Gambar 3. Peta Garis Pantai Thailand<sup>34</sup>



Sebagai salah satu industri *seafood* terbesar di dunia, 90% dari produksi di sektor perikanan di ekspor ke berbagai negara di dunia. Dari nilai ekspor yang mencapai US\$ 7 Milyar per tahun, US\$ 2.6 Milyar berupa Tuna, US\$ 1.1 Milyar berupa udang siap saji, US\$ 895.9 Juta makanan udang beku, US\$ 314.1 Juta berupa ikan dan cumi dan US\$ 234.5 Juta ikan sarden dan produk ikan lainnya.<sup>35</sup>

Tujuan ekspor produk Thailand di dominasi oleh Amerika Serikat (22.8%),

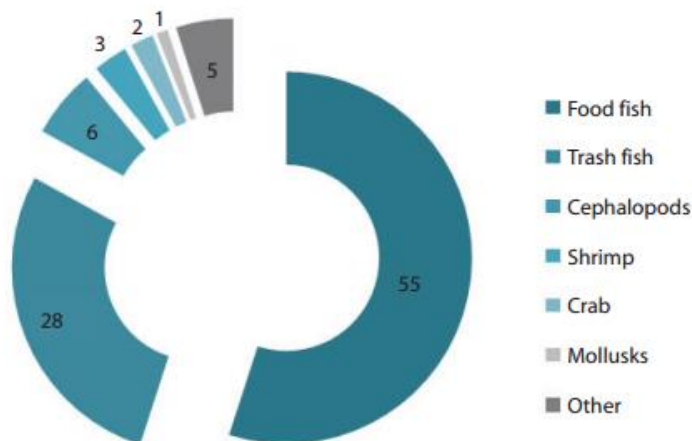
<sup>34</sup> International Labour Organization, 2015, *Employment practices and working condition in Thailand's Fishing sector*. Hal 12.

<sup>35</sup> SEAFISH, 2015, *Thailand Ethics Profile*.



Jepang (20.4%), Australia (5.4%), Kanada (4.4%) dan Inggris (3.9%). Sektor perikanan Thailand di tahun 2013 lebih fokus pada produksi udang, sekitar 80% produk laut yang dihasilkan adalah udang.

Gambar 4. Jabaran Hasil Tangkapan Komersil<sup>36</sup>



Perkembangan pesat sektor perikanan Thailand dapat dilihat dari total produksi pertahunnya yang mencapai lebih dari setengah juta metrik ton yang dihasilkan sekitar 25,000 titik peternakan hasil laut. Sektor perikanan sendiri menyumbang sekitar 9.9% dari jumlah *Gross Domestic Product* (GDP) agrikultur Thailand.<sup>37</sup> Kebanyakan perusahaan yang bergerak di sektor perikanan merupakan milik keluarga turun – temurun atau bisnis – bisnis kecil, namun juga ada beberapa perusahaan besar yang bergerak di sektor perikanan. Salah satu perusahaan *seafood* terbesar asal Thailand adalah *Charoen Pokphan Food Public Company* (CP Foods). Sebagai perusahaan yang menghasilkan produk-produk udang dan makanan laut lainnya, CP Foods memiliki sekitar 150 tempat pembekuan produk dan 50 tempat pengemasan kaleng yang sebagian besar berada

<sup>36</sup> International Labour Organization, 2015, *Employment practices and working condition in Thailand's Fishing sector*. Hal 12.

<sup>37</sup> Ibid.



di area Samut Sakhon.<sup>38</sup> Dalam memasarkan produk ke pasar internasional, semua perusahaan harus terdaftar ke dalam *Thai Frozen Foods Association* (TFFA).

Perusahaan *seafood* besar lainnya adalah Thai Union yang mendominasi pasar hingga 37%. Sebagai salah satu negara pengekspor Tuna terbesar di dunia, 90% dari produk – produk Tuna melewati proses penangkapan yang panjang dan melibatkan kapal – kapal penangkap ikan kecil. Hal tersebut yang menyebabkan permintaan untuk stok hasil laut terus meningkat, sehingga kapal – kapal penangkap ikan harus memaksimalkan sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan tersebut. Kapal-kapal penangkap ikan harus memasukkan lebih banyak pekerja dan terus memperluas area penangkapan ke perairan internasional untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak lagi.

Setelah 50 tahun kapal – kapal Thailand melakukan penangkapan ikan di perairan asing, ditemukan berbagai kasus kerja paksa, perbudakan, detensi dan eksploitasi fisik terhadap para nelayan yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan. Sebagian besar dari pekerja yang dieksploitasi merupakan korban perdagangan orang yang marak dilakukan oleh sindikat perdagangan orang.<sup>39</sup> Diantara pekerja yang berhasil diselamatkan, ada yang telah bekerja di lautan untuk waktu yang sangat lama, sebagian lainnya ditinggal dan dipekerjakan di pulau-pulau kecil di perairan Indonesia.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN). 2015. *The Special Report on Operations saving workers in fishing boats from Indonesia*. Diakses dari <https://lpnthailand.files.wordpress.com/2015/08/the-special-report-on-operations-saving-workers-in-fishing-boats-from-indonesia.pdf> pada 6 November 2019



#### 4.2 Modern Slavery di Thailand

Istilah *modern slavery* memiliki terminologi berbeda di beberapa negara di dunia. ada beberapa jenis tindak kejahatan yang dimasukkan ke dalam perbudakan modern, diantaranya perdagangan orang, pekerja paksa, pernikahan paksa dan eksploitasi anak di bawah umur. Landasan hukum Thailand berangkat dari kasus – kasus perdagangan orang dan kerja paksa yang memiliki kaitan erat dengan perbudakan modern. Sebelum tahun 2008 hampir tidak ada satu orang pun yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena pemerintah Thailand hanya melihat wanita sebagai korban perdagangan orang yang bekerja di industri seks, sementara pria dilihat sebagai korban penyelundupan orang. Baru di tahun 2008, melalui *Persons Act* 2008, Thailand mengakui perdagangan orang sebagai sebuah kejahatan kriminal.

Di tahun 2012, lembaga hukum Thailand melakukan inspeksi ke 54.090 tempat kerja dan menemukan ribuan kasus perdagangan orang, namun hanya dua kasus yang dikategorikan ke dalam *forced labour* atau kerja paksa.<sup>40</sup> Dari kasus Kantang yang dijelaskan di dalam laporan investigasi EJF, 14 orang budak asal Myanmar berhasil dibebaskan dari sebuah kapal penangkap ikan, namun hanya ketua kru kapal yang dijatuhi hukuman 3.5 bulan penjara dengan tuduhan mengangkut migran yang tidak punya dokumen. Tidak ada investigasi lanjutan maupun penelusuran terkait pemilik kapal dan perusahaan yang mempekerjakannya, hal ini disebabkan karena Thailand hanya melihat kasus perdagangan orang sama seperti kasus eksploitasi seksual.

<sup>40</sup> Mutaqin, Zezen, 2018, *Modern-day Slavery at Sea: Human Trafficking in the Thai Fishing Industry*. Jurnal of East Asia and International Law. Hal. 86.

UNODC *Global Report on Trafficking 2009* mendeskripsikan tiga alasan mengapa perdagangan orang atau perdagangan pekerja tidak terlihat jika dibandingkan dengan perdagangan seks selama beberapa dekade terakhir. Yang pertama karena adanya masalah dalam legislasi yang tidak memasukkan *forced labour* ke dalam pasal-pasal perdagangan orang. Kedua, adanya asumsi umum dari penegak hukum negara dan masyarakat bahwa perdagangan orang adalah bentuk dari eksploitasi seksual. Ketiga, adanya fakta bahwa kebanyakan kasus perdagangan pekerja terselubung dan terisolasi di dalam sektor-sektor pekerjaan seperti konstruksi, perikanan dan perkebunan. Selama tahun 2010 – 2013 status Thailand di TIP Report berada dalam *Tier 2 Watch List*, dimana Thailand dinilai tidak mampu melihat ketiga alasan yang dijelaskan di dalam laporan UNODC dalam menangani kasus perdagangan orang yang menjadi akar dari *modern slavery*.

Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan pemerintah Thailand dalam menanggulangi kasus *modern slavery* di sektor perikanan yaitu, regulasi yang mengatur sektor perikanan, ketenagakerjaan dan perdagangan orang. Landasan regulasi Thailand terkait sektor perikanan adalah *The Fisheriers Act, B.E. 2490* tahun 1947 yang menjadi kunci dalam pengelolaan sektor perikanan Thailand, dimana setiap peralatan penangkap ikan harus mendapat ijin resmi dari departemen perikanan.<sup>41</sup> Namun dalam praktiknya, FAO dan beberapa organisasi terlibat lainnya menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak efektif karena hanya mengatur peralatan yang digunakan dalam menangkap ikan sehingga tidak

<sup>41</sup> *Ibid.*

memberi akses terhadap pemeriksaan terhadap kru kapal. Regulasi tersebut juga tidak relevan karena dibuat sebelum Thailand menjadi negara penghasil *seafood* terbesar dunia. Untuk menanggapi kritik tersebut, Thailand melakukan revisi terhadap *Fisheries Act 1999* yang draftnya baru dimasukkan ke tim legislasi nasional di tahun 2014 dan baru diberlakukan di tahun 2015.

Dalam aspek ketenagakerjaan, Thailand memiliki *the Labour Protection Act of 1998* yang telah diamandemen pada tahun 2008 dan 2010, *the Labour Relations Act of 1979*, *the Act on Establishment of Labour Courts and Labor Court Procedures of 1979*, *the Act of 1990* dan *Compensation Act of 1994*.<sup>42</sup>

Peraturan-peraturan tersebut yang melandasi bagaimana negara mengatur hubungan antara pekerja dengan pihak yang mempekerjakan mereka seperti upah minimum, jam kerja, jatah cuti dan kondisi-kondisi lainnya. Namun peraturan ini tidak akan mampu melindungi pekerja yang direkrut secara liar tanpa menggunakan dokumen dan ijin resmi. Ketidakmampuan landasan hukum Thailand menjangkau korban perbudakan modern menjadi faktor terbesar banyaknya pekerja sektor perikanan yang bekerja hingga 20 jam tanpa ada jaminan kesehatan seperti yang dijanjikan pemerintah.

Dalam aspek *human trafficking*, Thailand menggunakan landasan hukum yang sudah kadaluarsa yaitu *the trafficking in Women and Girls Act 1928* yang hanya mendefinisikan *human trafficking* sebagai bentuk dari eksploitasi seksual bagi perempuan. Kemudian mengikuti ratifikasi terhadap *Parlemo Protocol* di

<sup>42</sup> Thai Anti-Human Trafficking Action, Hal 87.

tahun 2001, Thailand mengeluarkan *Anti-Trafficking in Persons Act* (ATIP) di tahun 2008 yang mendefinisikan *trafficking* sebagai:

Siapapun, yang dengan sengaja, melakukan hal berikut; (1) melakukan pengadaan, membeli, menjual, membawa atau mengirim, menahan atau membatasi, menyembunyikan atau menerima seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian uang atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain dalam membiarkan pelaku mengeksploitasi orang di bawah kendalinya; atau (2) mengadakan, membeli, menjual, membawa, mengirim, menahan atau membatasi, menyembunyikan atau menerima seorang anak, dianggap sebagai pelaku perdagangan orang.<sup>43</sup>

Selain mengadopsi *Palermo Protocol* dan ATIP 2008, pemerintah Thailand juga menerapkan 3P (persekusi, proteksi dan prevensi). Pendekatan tersebut menekankan pada perlindungan dan pendampingan korban dengan memberi makan, tempat tinggal sementara, bantuan medis serta rehabilitasi fisik dan mental. Namun pada kenyataannya pendekatan tersebut tidak dilakukan secara maksimal karena tidak ada keharusan bagi pemerintah untuk melakukan hal tersebut seperti yang tercantum di dalam landasan hukum. TIP Report menjadi bukti bahwa selama delapan tahun, pemerintah Thailand gagal dalam memenuhi standard minimum untuk melawan perdagangan orang. Selama itu pula *modern slavery* di sektor industri perikanan Thailand berkembang menjadi praktik kejahatan kompleks yang sulit untuk diselesaikan.

#### 4.3 Jaringan Labor Right Promotion Network (LPN)

Eksistensi *Labour Rights Promotion Network* sebagai yayasan dan wadah bagi aktivis menjadi pondasi dalam upaya penyelamatan pekerja migran terutama

<sup>43</sup> *Anti-Trafficking in Persons Act* 2008.

di sektor perikanan Thailand. LPN dibentuk pada tahun 2004 oleh Patima dan Sompong beserta aktivis lain yang memiliki komitmen dalam memperjuangkan hak-hak pekerja sektor perikanan di provinsi Samut Sakhon, Thailand.<sup>44</sup> Fokus utama LPN adalah pada kesejahteraan pekerja migran, karena pekerja migran adalah kelompok pekerja yang paling banyak di eksploitasi di Thailand. Perusahaan akan menysar kepada individu-individu lemah yang terkatung-katung, tidak punya tempat tinggal dan mereka yang memiliki kerentanan. Hampir 90% dari populasi yang bekerja di sektor perikanan adalah merupakan pekerja migran.

Namun dalam operasinya, LPN tetap mengupayakan keadilan bagi seluruh pekerja yang hak-haknya dirampas secara paksa. Target utamanya adalah mewujudkan kondisi kerja yang layak bagi pekerja migran di sektor perikanan Thailand dengan cara berjejaring dengan aktor lokal dan juga internasional sehingga mampu mendorong perubahan kebijakan negara. LPN mengkategorikan beberapa jenis kasus yang sering menimpa pekerja migran diantaranya;<sup>45</sup>

- Slavery* atau perbudakan, kasus ini paling banyak terjadi dimana pekerja migran rentan dijemak dan dipekerjakan secara paksa. Salah satu kasus menunjukkan bagaimana seorang pekerja terjebak dalam sebuah pekerjaan yang mengharuskannya untuk bekerja selama 20 jam

<sup>44</sup> Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN). Diakses dari [http://jica-cb-workshop.weebly.com/uploads/8/0/7/2/8072630/lpn\\_history\\_in\\_samutsakhon.pdf?fbclid=IwAR03IBmsnF5JKOKGb-jONAB4EqSiowbB6Fo-flda6HNdeAtn2uIVGOI8gwm](http://jica-cb-workshop.weebly.com/uploads/8/0/7/2/8072630/lpn_history_in_samutsakhon.pdf?fbclid=IwAR03IBmsnF5JKOKGb-jONAB4EqSiowbB6Fo-flda6HNdeAtn2uIVGOI8gwm) pada 5 November 2019

<sup>45</sup> *Human beings are not for sale*. Diakses dari <https://www.lpnfoundation.org/about> pada 5 November 2019

setiap harinya selama empat tahun dengan bayaran rendah bahkan tidak ada bayaran sama sekali.

- b. Jebakan hutang, kondisi ini terjadi diakibatkan seringkali pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran yang mengharuskannya membayar sanksi, untuk itu pekerja harus mau bekerja tanpa upah demi membayar hutang yang tidak kunjung lunas tersebut.
- c. Penculikan anak, ada banyak kasus dimana anak-anak di bawah umur diculik dan dipekerjakan dengan memalsukan identitas mereka sehingga menutup akses bagi mereka untuk menghubungi keluarganya dan melapor kepada pihak berwajib.
- d. *Abuse* atau penganiayaan sering ditemui di lingkungan kerja yang minim pengawasan, pekerja disakiti secara fisik maupun mental dalam bentuk ancaman, pemukulan, dibiarkan kelaparan tanpa adanya ruang perlawanan.

Ada tiga aktivitas utama yang dilakukan LPN dalam skala domestik yaitu;

#### **A. Penyelamatan**

Aktivis dan NGO lokal sangat berperan dalam melakukan penyelamatan dan membantu para korban selamat untuk memproses kasusnya. Selain LPN beberapa kelompok aktivis dan NGO lokal lainnya seperti Raks Thai Foundation (RTF), Stella Maris, World Vision Foundation of Thailand (WVFT) dan Foundation for AIDS Rights (FAR), yang ikut melakukan upaya dalam penyelamatan pekerja.<sup>46</sup> NGO

<sup>46</sup> International Labour Organization, 2011, *Trafficking of Fishermen n Thailand*. Hal 17.

merupakan kontak pertama yang akan dihubungi oleh pekerja ketika membutuhkan bantuan dalam lingkungan kerja, untuk itu LPN saling berkomunikasi untuk membuka layanan pelaporan dan mengarahkan NGO terdekat untuk melakukan penyelamatan.

Di tahun 2006, LPN dibawah pimpinan Sompong Srakaew melibatkan aktivis, NGO dan penegak hukum lokal untuk melakukan penggrebekan di sebuah pabrik pengolahan udang. Dari penggrebekan tersebut, LPN bersama jaringan berhasil membebaskan 66 orang warga negara Myanmar yang terjebak di dalam kerja paksa. Setelah itu LPN bersama jaringan lokalnya memberikan bantuan untuk pekerja yang diperlakukan tidak layak, dimana 39 dari 99 orang kru kapalnya dibiarkan mati kelaparan di tengah laut. Untuk itu Sompong mengarahkan LPN dan NGO lokal untuk melakukan advokasi terkait kasus tersebut kepada pemerintah Thailand. Hasilnya, Thailand memperkuat instrumen hukum terkait perdagangan orang dengan mengkriminalisasi tindak perdagangan orang di The 2008 Anti-Trafficking Act.<sup>47</sup> Penggrebekan tersebut efektif dalam mempresekusi pemilik pabrik dan jajarannya, tujuannya agar lebih banyak lagi aksi kolaboratif yang dilakukan NGO dengan lembaga penegakan hukum dalam menyelamatkan pekerja.

LPN berusaha melibatkan sebanyak mungkin pihak seperti aparat kepolisian, Department of Special Investigations (DSI), dan di dukung juga oleh watchdog LPN yang tersebar di banyak titik lokasi kerja di

<sup>47</sup> U.S. Department of States, 2008, *TIP Heroes: Somong Sarakaew*.

beberapa provinsi di Thailand. Watchdog adalah sebutan bagi community volunteer yaitu pekerja-pekerja yang tersebar berbagai lokasi kerja di industri dan kapal-kapal yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dari LPN, mereka akan melaporkan jika ada bentuk kekerasan, pemaksaan dan segala bentuk eksploitasi yang terjadi di lingkungan kerja masing-masing. Salah satu laporan dari pekerja asal Myanmar mengatakan bahwa dari 119 orang yang dijanjikan pekerjaan, 59 dari mereka telah bekerja namun 64 lainnya disuruh menunggu dan dikurung sampai diberi pekerjaan. Untuk kasus seperti ini LPN akan membantu membuat laporan kepada polisi kemudian mempertimbangkan opsi tindak lanjut bersama polisi dan Dinas Sosial dan Keamanan.

## **B. Pemberdayaan**

Untuk memberikan pemberdayaan kepada korban selamat, LPN beserta jaringan menyediakan shelter yang dibangun atas bantuan dari donor dan mitra LPN dalam pemberdayaan pekerja migran. Daerah Mahachai, lokasi headquarter dan shelter yang dibangun LPN, disebut sebagai Little Myanmar karena banyaknya pekerja migran warga negara myanmar yang berhasil di selamatkan oleh jaringan LPN dan tinggal di area tersebut. Setelah diselamatkan dari lingkungan pekerjaan yang eksploitatif, para pekerja asal myanmar tersebut masih menghadapi masalah dengan polisi setempat. Illegal Migran, sering menjadi sasaran bagi polisi daerah, beberapa migran pernah ditangkap dengan tuduhan berjudi saat berolah raga, sehingga untuk menghindari deportasi atau



dibawa ke pengadilan, mereka akan membayar denda secara tidak resmi kepada polisi.<sup>48</sup> Untuk itu sangat penting bagi LPN dan jaringan melakukan upaya pemberdayaan pasca penyelamatan korban-korban perbudakan.

Kemiskinan akan mendorong munculnya lebih banyak pekerja dengan upah murah dan jeratan hutang yang menyebabkan putaran eksploitasi tenaga kerja terus terjadi di sektor menengah ke bawah. Untuk mencegah hal itu, LPN beserta jaringan memberikan layanan edukasi dan mendorong semua anak-anak migran untuk masuk sekolah. Bersama Thai Union, LPN memberikan training session berkala kepada anak-anak dari pekerja migran sebagai bentuk pembekalan.<sup>49</sup> Edukasi adalah kunci keberhasilan setiap orang, apabila anak-anak migran memiliki tingkat edukasi yang rendah maka mereka akan jadi pekerja seperti orang tua mereka dan terperangkap dalam putaran yang sama. Untuk itu LPN sangat menentang perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin anak-anak di lingkungan kerja orang tuanya untuk dibekali dengan edukasi.

Dalam satu dekade terakhir ada sekitar 2.564 anak-anak pekerja migran yang berhasil diselamatkan LPN dari industri perikanan Thailand.

Di tahun 2015, ada temuan fakta bahwa 37 anak dari pekerja migran dipaksa untuk ikut bekerja di pabrik udang di Samut Sakhon. Oleh karena

<sup>48</sup> The Nation Thailand, 2018, *Migrants in Mahachai live in fear of police extortion*. Diakses dari <https://www.nationthailand.com/national/30357621> pada 9 Desember 2019.

<sup>49</sup> Thai Union, 2016, *Thai Union and LPN provide Labor Rights Booklet to Migrant Workers*. Diakses dari <https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/440/thai-union-and-lpn-provide-labor-rights-booklet-to-migrant-workers> pada 9 Desember 2019.

itu peran pemerintah dibutuhkan dalam memastikan setiap anak di Thailand mendapatkan akses terhadap pendidikan. Untuk mengupayakan pendidikan gratis, LPN bekerjasama dengan pemerintah lokal dalam proyek Education for All yang merupakan program kelas khusus bagi pekerja migran dan anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan.<sup>50</sup> Setidaknya anak-anak tersebut masih punya harapan untuk keluar dari lingkaran perbudakan.

Selain edukasi untuk anak-anak, LPN juga memberikan seminar dan training kepada pekerja, khususnya pekerja migran dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pekerja dengan membekali mereka pengetahuan tentang regulasi dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Thailand. Salah satu program edukasi yang dilakukan LPN adalah bentuk kerjasama dengan Charon Pokphan Foods (CP Foods) salah satu perusahaan yang terjerat kontroversi modern slavery dalam pemberitaan media di tahun 2014 dan masuk kedalam jejaring LPN. Setelah mendapat kecaman dan tekanan akibat adanya indikasi perbudakan di dalam supply chain yang digunakan untuk memproduksi produknya, CP Food menunjukkan upaya pembersihan produksinya dari eksploitasi pekerja, salah satunya dengan bergerak bersama LPN. Selain pembekalan, LPN dan CP Foods juga sepakat untuk menyediakan Labour Voices Centre.

Melalui Labour Voices Centre, LPN membuktikan model kerjasama antara NGO dengan perusahaan swasta dimana akan

<sup>50</sup>The Nation Thailand, 2018, *Schooling offers bright future for migrants*. Diakses dari <https://www.nationthailand.com/national/30358975> pada 9 Desember 2019.

memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap permasalahan hak pekerja di Asia Tenggara. Layanan tersebut memberikan konsultasi dan membantu menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja.

Masalah yang dikonsultasikan ke LPN akan dikomunikasikan ke perusahaan untuk diberikan solusi sehingga pekerja dan perusahaan mendapat rekomendasi dalam mengambil tindakan. Layanan Labour Voices Centre dilengkapi dengan bantuan penerjemah dan dikembangkan ke perusahaan-perusahaan lainnya sehingga sebagian besar pekerja migran dan pekerja di pabrik-pabrik memiliki kontak layanan tersebut.<sup>51</sup>

### C. Advokasi

Untuk memperluas perputaran informasi dan memperkuat upaya advokasi, LPN merangkul jaringan advokasi lain seperti Anti-Human Trafficking Network (ATN) yang bergerak dalam kasus perdagangan orang. Advokasi khusus pekerja migran dilakukan dengan berjejaring melalui *Migrant Working Group* (MWGT) yang beranggotakan lebih dari 15 institusi akademik, *Civil Society Organizations* (CSOs) dan komponen pemerintah. MWGT menjadi pusat pertukaran informasi bagi pekerja migran, menganalisa masalah yang dihadapi pekerja migran, menetapkan agenda, melakukan kampanye dan advokasi di level domestik.

Untuk menemukan solusi paling efektif, di tahun 2016 LPN membentuk Thai CSO Coalition yang didukung oleh Oxfam dengan misi mencari solusi untuk membersihkan supply chain Thailand dari

<sup>51</sup> CP Food Worldwide, 2017, *CPF urges migrant workers to speak up through a third party hotline*. Diakses dari <https://www.cpfworldwide.com/en/media-center/1056> pada 9 Desember 2019.

perbudakan. Koalisi tersebut melahirkan 12 strategi dan merangkul pemerintah Thailand dan memberi arahan kepada konsumen dan produsen seafood. LPN juga tergabung ke dalam Thai CSO Coalition bersama 11 NGO lokal lainnya bergerak dibawah Oxfam untuk mengatur strategi dan melibatkan pemerintah dalam upaya pembersihan supply chain Thailand dari segala bentuk modern-day slavery.

Di skala internasional, Jaringan LPN mencakup Media, IGO dan Pemerintah negara lain. Salah satu agenda yang telah menjadi fokus LPN di tahun 2014 adalah menyelamatkan lebih banyak lagi pekerja migran dan meyakinkan pemerintah Thailand bahwa isu perbudakan dan eksploitasi pekerja masih menjadi sebuah urgensi. LPN bersama IOM, *Associated Press* dan aktivis lainnya melakukan operasi penyelamatan pekerja dengan melacak dan menyusuri jalur kapal – kapal penangkap ikan yang berangkat dari pelabuhan Thailand dan berhasil memulangkan lebih dari 2000 pekerja.<sup>52</sup> Sementara untuk aktor pemerintah, LPN menjalin kemitraan dengan *U.S. Department of state* untuk membantu pelaporan dalam TIP Report per tahunnya.

Salah satu riset yang dilakukan LPN dengan dukungan pendanaan dari organisasi donor asal Jerman yaitu *Terres des hommes Germany* dipublikasikan dalam sebuah laporan dengan judul *A report on Migrant Children & Child Labourers in Thailand's Fishing and Seafood*

<sup>52</sup> Associated Press, 2015, *An AP investigation helps free slaves in the 21st century.*

*Processing Industry*.<sup>53</sup> Laporan tersebut menggambarkan bagaimana keadaan pekerja migran di bawah umur yang dipaksa bekerja untuk perusahaan-perusahaan *seafood* di Thailand. Selain itu LPN berusaha memfasilitasi investigasi yang dilakukan oleh jurnalis dari media maupun organisasi yang membahas kasus *modern slavery*.

Sejak tahun 2015, *The Freedom Fund* telah mendukung LPN sebanyak tiga kali. Pendanaan pertama diberikan dalam jangka lima bulan dengan total dana \$20,000 digunakan dalam upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, layanan dokumen resmi dan juga rehabilitasi bagi korban yang berhasil diselamatkan. Pendanaan kedua diberikan untuk waktu yang lebih lama yaitu jangka waktu tiga tahun dengan jumlah dana sebanyak \$193,670 digunakan untuk kampanye di media sosial dan media lainnya dan memberikan fasilitas *shelter*, pembekalan bagi jaringan yang ada di tempat kerja, *monitoring* dan dokumentasi.<sup>54</sup> Pendanaan ketiga dilakukan untuk mendukung film dokumenter *Ghost Fleet* yang akan di rilis di akhir tahun 2018. *Ghost Fleet* menceritakan operasi penyelamatan yang dilakukan oleh aktivis LPN bersama jurnalis AP dan media lokal di perairan Thailand dan Indonesia.

Bentuk advokasi lain yang dilakukan LPN adalah berusaha mendukung riset-riset internasional dengan menyediakan penerjemah dan menjadi jembatan antar peneliti dan pihak terkait. Contohnya, LPN

<sup>53</sup> LPN Foundation, *A Report on Migrant Children & Child Labourers in Thailand's Fishing and Seafood Processing Industry*. Diakses dari <https://lpnthailand.files.wordpress.com/2017/04/a-report-on-migrant-children-child-labourers-2015.pdf> pada 7 November 2019

<sup>54</sup> The Freedom Fund, 2015. Diakses dari <https://freedomfund.org/partners/labour-rights-promotion-network-foundation/> pada 9 Desember 2019

berkontribusi dalam riset kolektif *Mig-Right project* yang dibentuk oleh EU dan diimplementasikan oleh *Civil Volunteer Group* (GVC), LPN, dan *Legal Support for Children and Women* (LSCW). Aktor-aktor jaringan LPN membantu EU dalam melakukan riset ini dalam menyediakan informasi dan mengatur pertemuan peneliti dengan informan yang dibutuhkan.<sup>55</sup> Dengan melibatkan diri dalam proyek skala internasional, LPN memiliki kesempatan untuk mendapat rekognisi dan menyampaikan misi yang dibawanya kepada aktor besar seperti EU.

LPN memulai misi penyelamatan pertama di lautan internasional. Dalam operasi tersebut, LPN bekerjasama dengan IOM, *Association Press*, media lokal dan aktivis lainnya.<sup>56</sup> Operasi penyelamatan tersebut dilakukan dari tahun 2014 - 2016 dan berhasil menyelamatkan sekitar 3000 pekerja yang terperangkap di pulau-pulau kecil seperti ambon dan benjina. Hasil dari operasi tersebut banyak dijadikan sebagai fakta landasan dalam pengambilan kebijakan negara dan organisasi. Dalam operasi menyusuri perairan Thailand dan Indonesia tersebut, LPN juga menemukan 39 orang pekerja korban *trafficking* yang meninggal di dalam kapal kapal Indonesia.<sup>57</sup>

Untuk itu LPN berusaha untuk melakukan upaya yang lebih besar lagi dan melibatkan aktor lebih banyak lagi.

<sup>55</sup> Labour Migration and Human Trafficking. 2018. Pp 1

<sup>56</sup> LPN Foundation. 2015. *A special Report on Operations saving workers in fishing boats from Indonesia*. Diakses dari <https://lpnthailand.files.wordpress.com/2015/08/the-special-report-on-operations-saving-workers-in-fishing-boats-from-indonesia.pdf> pada 5 November 2019

<sup>57</sup> End Slavery Now. 4 Januari 2016. *Freedom from Slave Fishing Ship*. Diakses dari <https://www.endslaverynow.org/blog/articles/freedom-from-slave-fishing-ships> pada 20 Desember 2019.

#### 4.2 Peran Media dalam Upaya Perlindungan Pekerja Sektor Perikanan

Tahun 2014 adalah puncak dari meledaknya pemberitaan terkait perbudakan modern yang terjadi di sektor perikanan Thailand, salah satu negara pengekspor *seafood* terbesar di dunia. Pemberitaan media dan laporan yang dipublikasi oleh NGO dan media global juga dilandasi oleh hasil riset dan investigasi yang difasilitasi oleh NGO lokal, salah satunya LPN. Sebagai salah satu aktor di dalam jaringan advokasi transnasional untuk kasus *modern slavery*, LPN berperan besar dalam menyediakan informasi yang didapatkan langsung dari kasus. Melalui kegiatan utamanya yang terjun langsung ke lapangan, LPN memiliki akses terhadap informasi dan testimoni, menjadikannya salah satu NGO lokal yang memiliki data terbanyak dalam kasus perbudakan modern di sektor perikanan Thailand.

Istilah *Modern Slavery* kemudian mencuri perhatian dunia ketika media asal Inggris, *The Guardian*, lewat sebuah *investigative journalism* mengungkap fakta dibalik sebuah perusahaan *shrimp* konglomerat terbesar di Thailand, Charoen Pokphand (CP) Food, yang terbukti memiliki *supply chain* atau pasokan bahan produksi dari kapal-kapal kecil yang mempekerjakan budak.<sup>58</sup> Pemberitaan tersebut diikuti dengan publikasi-publikasi terkait isu yang sama dari media besar lainnya seperti *The Bangkok Post*, *The Wall Street Journal* dan *USA Today*, disiarkan melalui BBC, Fox News dan *Voice of America* serta investigasi lebih

<sup>58</sup> The Guardian. 10 Juni 2014. *Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK*. diakses dari <https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour> pada 20 Maret 2018

lanjut dari *Associated Press* dan *New York Times*.<sup>59</sup> Naiknya isu *Modern Slavery* di skala internasional memberi tekanan lebih kepada pemerintah terkait, yaitu pemerintah Thailand, untuk mengakhiri segala bentuk perbudakan modern di sektor perikananannya.

Pemberitaan media online *The Guardian* menjadi awal mula dari advokasi yang dilakukan oleh media global sehingga isu *modern slavery* menjadi agenda publik internasional. Sebelumnya, publik internasional tahu bahwa selama bertahun-tahun Thailand mendapat kecaman atas kurangnya upaya dalam penegakan HAM dan penyelesaian kasus perdagangan orang. *The Guardian* melakukan *investigative journalism* selama enam bulan sebelum mempublikasikan rangkaian informasi dan fakta yang menunjukkan bahwa adanya indikasi praktik *modern slavery* di dalam industri milyaran juta *dollar* tersebut.<sup>60</sup> Ledakan pemberitaan media global menjadi jembatan bagi aktivis yang bergerak dalam kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja di sektor perikanan.

NGO lokal seperti LPN memiliki ruang gerak yang terbatas di negara represif seperti Thailand. Upaya LPN bersama jaringannya di skala domestik didukung oleh pemberitaan media global dan inisiatif media untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait *modern slavery* dan membantu memberitakannya ke publik internasional. Rangkaian pemberitaan media global juga menjadikan LPN beserta jaringan domestiknya sebagai jembatan dalam proses jurnalisme maupun investigasi oleh media. Sehingga dapat dikatakan, media global berperan besar

<sup>59</sup> Casting a Tight Net, diambil dari [https://ssir.org/articles/entry/casting\\_a\\_tight\\_net](https://ssir.org/articles/entry/casting_a_tight_net) diakses pada 18 Mei 2018

<sup>60</sup> Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK, diakses dari <https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour> pada tanggal 20 Maret 2018



dalam mengangkat isu *modern slavery* ke dalam agenda global sehingga mendorong publik untuk membahas isu tersebut. Hal ini juga yang membuat advokasi transnasional dapat dilakukan dan menarik aktor – aktor internasional lainnya untuk terlibat.



**BAB V****Strategi Advokasi Jaringan LPN dalam Upaya Menyelamatkan Pekerja Migran dari *Modern Slavery* di Sektor Perikanan Thailand Tahun 2014 -2018**

Dalam konsep jaringan advokasi transnasional (TAN) yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink, jaringan terbentuk atas dasar adanya kesamaan nilai yang dipercayai. Patima bersama suaminya Sompong dan yayasan yang dikelolanya LPN telah memberikan layanan secara langsung kepada korban-korban *human trafficking* dan *forced labor* selama sepuluh dekade. Data yang didapat dari riset dan operasi penyelamatan bertahun-tahun cukup memberi gambaran tentang kompleksitas yang dihadapi dalam memerangi perbudakan modern. Meskipun LPN kerap bekerjasama dengan pemerintah dan aparat kepolisian namun negara perlu membuat regulasi dan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan upaya yang dilakukan.

Sebagai NGO yang menangani kasus pekerja migran secara langsung selama sepuluh tahun, LPN merasa upaya penyelamatan pekerja di sektor perikanan masih menjadi masalah urgent yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Junta Militer yang memegang kekuasaan setelah kudeta militer sangat membatasi kegiatan aktivisme yang berpotensi mengganggu kestabilan politik domestik. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam proses advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM bagi pekerja di sektor perikanan. Ada hambatan atau blokade dalam komunikasi LPN dengan negara, meskipun laporan dan rekomendasi terus diberikan. Meskipun Pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya namun belum ada hasil secara praktis yang dapat terlihat. LPN

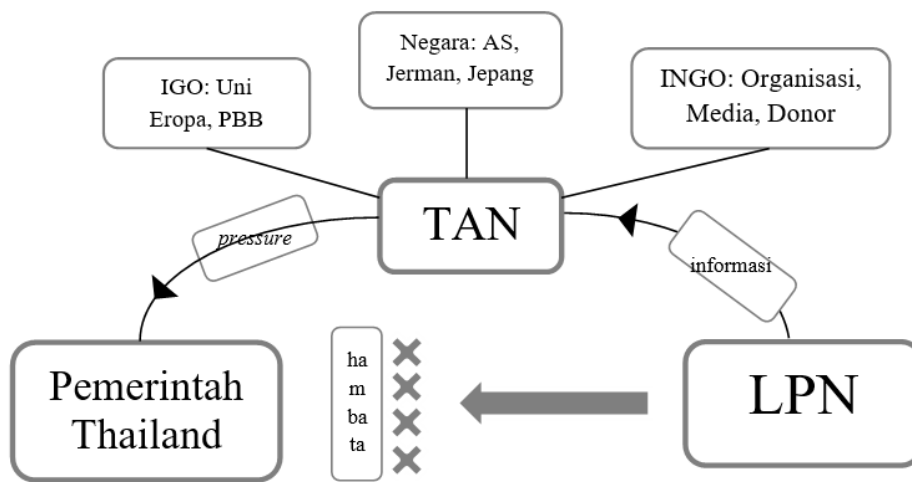
dapat membuktikannya dengan masih banyaknya korban yang melapor atau ditemukan lewat operasi penyelamatan. Hambatan lain datang dari *officials* atau pekerja resmi yang mengelola sektor perikanan. Banyaknya temuan tindakan korupsi, pemalsuan, penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran regulasi, tentunya merugikan para pekerja, terutama pekerja migran yang memiliki kerentanan.

Sesuai dengan yang dijabarkan oleh Keck dan Sikkink, ada tiga kondisi yang mendorong terbentuknya TAN yaitu adanya pola boomerang, *political entrepreneurship* dan konferensi internasional.<sup>61</sup> Dalam konteks LPN, pola boomerang dapat ditemukan dari adanya hambatan atau blokade dalam upaya LPN mengkomunikasikan masalah eksploitasi pekerja di sektor perikanan kepada Pemerintah Thailand. LPN menggunakan data dan rekomendasi sebagai bentuk komunikasi yang belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam regulasi dan kebijakan.

LPN juga mengungkapkan temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh *officials* di lapangan membuat regulasi dan program yang sudah dibuat pemerintah tidak efektif. Akibat hambatan-hambatan tersebut LPN memanfaatkan akses terhadap dunia internasional sebagai kesempatan untuk berjejaring dan mendapatkan dukungan dari lebih banyak aktor sehingga dapat melipatgandakan kekuatan untuk mendesak pemerintah Thailand.

<sup>61</sup> Keck, Margaret A. & Kathryn Sikkink. 1999.

Gambar 5. Pola Boomerang dalam Kasus Modern Slavery



Beberapa *major event* yang terjadi di tahun 2014 membuka peluang bagi LPN untuk berjejaring dengan lebih banyak aktor TAN di dalam upaya advokasinya. LPN sebagai yayasan yang sudah sepuluh tahun bersentuhan dengan kasus sedikit banyak menyumbangkan informasi berupa data, fakta maupun testimoni sebagai landasan dari pemberitaan dan laporan yang dipublikasikan oleh media global. Dari situlah LPN memulai misinya sebagai jaringan advokasi transnasional (TAN) yang bergerak untuk mengadvokasi kasus *modern slavery* di industri *seafood* Thailand. Sesuai dengan kondisi kedua yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink, jaringan advokasi transnasional terbentuk ketika adanya *political entrepreneurs*. Patima dan Sompong adalah dua dari sekian banyak aktivis yang menggerakkan LPN, mereka adalah para *political entrepreneur* yang menyadari pentingnya berjejaring ke ranah internasional untuk mendapatkan lebih banyak dukungan atas upaya yang mereka lakukan.

LPN terus membuka peluang kerjasama pada ruang lingkup global dalam bentuk riset, operasi, edukasi maupun kampanye. Melalui laporan dan data-data

yang diolah, LPN terus memberikan *update* terkait perkembangan kasus *modern slavey* baik dari sisi korban maupun dari sisi kebijakan pemerintah. Informasi tersebut kemudian di sampaikan di dalam forum-forum internasional yang juga menjelaskan kondisi ketiga dalam faktor pendorong terbentuknya jaringan advokasi transnasional dalam kasus *modern slavery*. Patima dikenal sebagai founder dan penggerak LPN yang terjun langsung dalam operasi-operasi penyelamatan korban eksploitasi. Sompong juga dikenal sebagai aktivis LPN yang terus melakukan advokasi dan penyampaian rekomendasi ke pemerintah domestik. Kedua sosok pendiri LPN tersebut memiliki banyak kesempatan untuk hadir di dalam forum internasional sehingga memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan dengan lebih banyak aktivis dan perwakilan NGO maupun pemerintah asing.

Melalui jaringan advokasi transnasional, Thailand mendapat kecaman dari masyarakat dunia akibat ketidakmampuan negara dalam memprioritaskan masalah perbudakan di sektor perikananannya. Pemerintah Thailand mendapat tekanan dan ancaman boikot produk dari dua pasar terbesarnya yaitu Amerika Serikat dan *European Union* (EU). Sementara Media Global terus melakukan pemberitaan terkait perkembangan kondisi pekerja di sektor perikanan dan respon dari pemerintah Thailand. Sementara itu, Patima, Sompong dan aktivis lainnya di dalam jaringan terus membawa isu pekerja migran di sektor perikanan ke dalam forum internasional untuk menciptakan lebih banyak upaya kolektif berskala internasional dalam menyelesaikan masalah. Berbagai tekanan dari luar tersebut

yang menjadi landasan untuk Thailand dalam melakukan perbaikan kebijakan dan pengambilan sikap.

Dari penjabaran di atas, jaringan LPN telah memenuhi ketiga kondisi yang disebutkan oleh Keck dan Sikkink yang dibuktikan dengan adanya pola boomerang dalam aktivitas jaringan LPN untuk memperjuangkan isu yang dibawanya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dari penelitian ini yaitu terkait strategi jaringan LPN dalam mengadvokasi kasus *modern slavery* di industri *seafood* Thailand, akan digambarkan melalui empat taktik TAN menurut Keck dan Sikkink. Keempat taktik TAN tersebut adalah *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

### 5.1 *Information Politics*

Dalam taktik Politik Informasi, sumber informasi yang digunakan dapat berupa fakta dan opini terkait kasus, cerita maupun testimoni korban. Informasi memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan jaringan advokasi transnasional, perputaran informasi akan membuat aktor-aktor yang ada di dalam jaringan bisa terus aktif melakukan advokasi terhadap isu yang diangkat. Selama sepuluh Tahun, LPN telah menangani ribuan kasus terkait korban perdagangan orang, perbudakan, korban penyekapan, pekerja di bawah umur dan korban prostitusi. Seiring dengan upaya penyelamatan korban, LPN aktif melakukan riset dan pengolahan data bekerjasama dengan *Asian Studies Institute* di *Chulalongkorn University*, *The Population and Society Institute at Mahidol University* dan *The Social Work Faculty at Thammasat University*.

Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa aktor-aktor yang ada di dalam jaringan akan membantu menyampaikan informasi tersebut ke dalam bentuk informasi yang menarik, dramatis dan mudah dipahami sehingga informasi dapat dicerna oleh sebanyak mungkin audiens.<sup>62</sup> Setelah *The Guardian* mengungkap bagaimana praktik perbudakan terjadi di dalam salah satu perusahaan *seafood* terbesar di dunia, LPN merasa perlu adanya lebih banyak operasi untuk membongkar kasus-kasus lainnya. Di tahun 2014, Jaringan LPN yang meliputi LPN, IOM dan *Associated Press* melakukan operasi penyelamatan dan investigasi di perairan Ambon dan Benjina, Indonesia.<sup>63</sup> Investigasi tersebut menjadi sumber fakta dan testimoni yang berhasil dikumpulkan jaringan LPN pasca pemberitaan *The Guardian*. Melalui investigasi tersebut, LPN ingin membuktikan bahwa permasalahan pekerja di sektor perikanan tidak hanya berhenti di saat satu kasus terkuak oleh media, melainkan menjadi awal dari terbongkarnya kasus-kasus lain.

Hasil investigasi tersebut kemudian diolah menjadi rangkaian artikel yang dipublikasikan melalui *website Associated Press* dengan judul *Seafood from Slaves*. Rangkaian artikel tersebut berusaha menggambarkan temuan-temuan fakta selama investigasi, menyajikannya ke dalam bahas media yang mudah dipahami.

Setiap artikel juga dilengkapi dengan video dan foto yang akan membantu mempermudah publik dalam memahami kondisi pekerja migran yang diperdagangkan dan dieksploitasi di perairan Indonesia, yang berawal dari kapal-kapal penangkap ikan dari Thailand. Melalui investigasi tersebut tim penyelamat

<sup>62</sup> Keck, Margaret A. & Kathryn Sinkkink. 1999. *Op Cit* pp 17

<sup>63</sup> Associated Press, 2015, *AP Investigation: Slaves may have caught the fish you bought*. Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> pada 9 Desember 2019.

menemui pekerja-pekerja asal Thailand dan Myanmar yang dikurung di dalam sel seperti penjara dan tidak pernah pulang selama puluhan Tahun.

Melalui artikelnya, para jurnalis AP melakukan *framing* terhadap data yang berhasil mereka temui di lapangan, menyajikan kutipan percakapan bersama para korban yang mereka temui dan menampilkan kondisi nyata di lapangan melalui video dari kamera tersembunyi. Narasi yang dibentuk oleh AP adalah berusaha meyakinkan publik internasional bagaimana praktik perbudakan memisahkan hasil tangkapan dari orang-orang yang menangkapnya dan menutupi fakta bahwa makanan laut yang ada di piringmu bisa saja dihasilkan oleh budak.<sup>64</sup> AP bersama tim mengikuti jejak kapal-kapal yang membawa budak dari Thailand hingga ke Benjina dan mengikuti truk yang mengangkut hasil tangkapan mereka untuk mengetahui kemana hasil tangkapan itu dibawa. Hasil penelusuran menyatakan fakta bahwa salah satu negara tujuan dari produk perbudakan tersebut adalah supermarket besar Amerika Serikat seperti Wal-Mart, Sysco dan Kroger.

Bagian penting dari sebuah upaya mempolitisasi sebuah informasi adalah bagaimana *framing* dapat membuat isu yang dibahas menjadi keresahan bersama bagi masyarakat global.<sup>65</sup> Operasi penyelamatan di benjina juga mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia, khususnya Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Seluruh pekerja yang ditemui di benjina diberi pilihan untuk dipulangkan dan sebagian dari mereka berlarian, melompati jendela, masuk kembali ke dalam untuk mengambil barang-barang mereka dan kembali

<sup>64</sup> Associated Press, 25 Maret 2015, *AP Investigation: Slaves may have caught the fish you bought*. Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> pada 9 Desember 2019.

<sup>65</sup> Keck, Margaret A. & Kathryn Sinkkink. 1999. *Op Cit* pp 19



lagi ke dermaga seakan tidak ingin ditinggalkan lagi.<sup>66</sup> AP memaparkan cerita haru dari salah satu pekerja yang berhasil dipulangkan setelah 22 tahun berada dalam rantai perbudakan.

Myint Naing, seorang pekerja asal Myanmar berkali-kali memohon kepada kapten kapalnya untuk dibebaskan dan dipulangkan. Meskipun semua pekerja di kapal tersebut tahu bahwa upaya tersebut sia-sia dan hanya memperkeruh keadaan. Myint ditinggalkan selama 3 hari kepanasan di bawah terik matahari dan dibiarkan menggigil di malam hari tanpa diberi makan dan minum. Tidak sedikitpun terpikirkan oleh seorang pemuda 18 tahun, bahwa keputusannya menerima tawaran pekerjaan di Thailand lewat seorang calo dan memaksa pergi kepada ibunya tanpa pamit akan memisahkannya ribuan mil dari rumah tanpa memiliki kesempatan untuk pulang. AP mendokumentasikan setiap langkah perjalanannya pulang dan bagaimana ibunya pingsan saat melihat anaknya yang telah hilang selama 22 tahun dari hidupnya.<sup>67</sup> Cerita tersebut benar-benar menggambarkan bagaimana seorang budak juga manusia yang berhak diselamatkan dan diperjuangkan.

Dalam proses distribusi informasi, aktor-aktor jaringan LPN menyampaikan informasi secara formal maupun informal. Secara formal informasi disampaikan melalui laporan, hasil riset, *newsletter* dan surat rekomendasi. Selain Secara informal informasi disampaikan melalui edukasi,

<sup>66</sup> Associated Press, 2015, *Over 300 Slaves rescued from Indonesia Island after AP Investigation into Forced Labour*. Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/over-300-slaves-rescued-from-Indonesia-island-after-ap-investigation.html> pada 15 Desember 2019.

<sup>67</sup> Associated Press, 1 Juli 2015, *Myanmar fisherman goes home after 22 years as a slave*. Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/myanmar-fisherman-goes-home-after-22-years-as-a-slave.html> pada 15 Desember 2019.

seminar, wawancara, video dan media sosial. Selain dipublikasikan dalam bentuk artikel di laman *website* resmi *Associated Press*, hasil investigasi dan operasi penyelamatan di Benjina juga disajikan dalam bentuk laporan yang dapat diakses publik. Selain Benjina lebih banyak pekerja berhasil diselamatkan di Ambon yang juga masih berafiliasi dengan kapal-kapal penangkap ikan dari Thailand. IOM menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 4000 pekerja migran yang terindikasi perdagangan orang dan perbudakan di Benjina dan Ambon.<sup>68</sup> Investigasi tersebut melacak pergerakan kapal menggunakan satelit dan menemukan destinasi sebagian besar hasil tangkapan yang di bawa ke Amerika Serikat.

Penyampaian informasi lainnya dilakukan melalui video dan film dokumenter. Mengikuti pemberitaan *The guardian* dan hasil TIP Report di tahun 2014, beberapa video yang beredar di internet membantu publik untuk memahami kondisi pekerja di sektor perikanan Thailand. Video-video investigasi mandiri yang dilakukan oleh *Environmental Justice Foundation* (EJF) dan dokumenter yang dipublikasi bersama pemberitaan *The Guardian*. Melalui *website* dan laman *youtube*, AP upaya jaringan LPN dalam menyelamatkan pekerja di perairan Thailand dan Indonesia diceritakan dalam bentuk video. Kemudian sosok-sosok yang berperan di dalam operasi penyelamatan 3000 pekerja tersebut diceritakan di sebuah film dokumenter berjudul *Ghost Fleet* yang akan ditampilkan di *Berlin Film Festival*.<sup>69</sup> Film dokumenter tersebut berusaha memberi gambaran

<sup>68</sup> The Bangkok Post, 2 April 2015, *Thailand, two Asean countries investigate fishing slavery reports*. Diakses dari <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/516423/thailand-two-asean-countries-investigate-fishing-slavery-reports> pada 15 Desember 2019.

<sup>69</sup> Variety. 21 Februari 2019

bagaimana proses penyelamatan dari sisi tim penyelamat dan juga dari sisi pekerja yang diselamatkan.

## 5.2 Symbolic Politics

Salah satu taktik yang biasa digunakan oleh aktor-aktor di dalam jaringan advokasi transnasional adalah politik simbol. Penggunaan simbol, aksi maupun cerita dilakukan untuk menjelaskan isu yang diangkat agar lebih mudah dipahami.

Dalam kasus *modern slavery* di industri perikanan Thailand, pendiri LPN, Patima Tungpuchayakul menjadi sosok simbolik dari gerakan penyelamatan dan pencegahan tindak perbudakan di perairan Thailand. Patima telah mengabdikan diri dalam penegakan hak hak pekerja migran selama 22 tahun, diawali dari kegiatan aktivisme bersama kelompok kecil hingga mendirikan salah satu NGO paling berpengaruh di Thailand dalam mengeliminasi pelanggaran bagi pekerja migran. Perjuangan Patima bersama LPN membawanya ke penghargaan sebagai *Honorable Mention Human Rights Watch Asia* di tahun dan *Pulitzer Prize* di tahun 2016, nominasi *Nobel Peace Prize* di tahun 2017, *Seafood Champion Sea Web* dan *Jairo Mora Sandoval Award* di Tahun 2018.<sup>70</sup> Sosok Patima tidak hanya menunjukkan figure seorang leader dan aktivis yang tidak kenal lelah, tapi juga membawa aksi dan cerita.

Operasi penyelamatan 3000 pekerja di Benjina dan Ambon, Indonesia, tidak lepas dari peran Patima, sebagai salah satu pemimpin dari tim penyelamat yang terdiri dari aktivis LPN, anggota IOM, jurnalis AP dan media lokal.

Keberanian dan determinasi Patima diakui sebagai orang paling berpengaruh

<sup>70</sup> LPN Foundation. *Team*. Diakses dari <https://www.lpnfoundation.org/team> pada 9 Desember 2019

dalam upaya penyelamatan pekerja dari *slavery* di Asia Tenggara. Aksi heroik tersebut mendapat apresiasi dari *Seafood Summit* yang mengundang Patima sebagai *2018 Winner, Seafood Champion Awards of Advocacy* untuk berbicara di dalam forum tersebut.<sup>71</sup> Di dalam forum tersebut Patima menegaskan kembali bahwa upaya penyelamatan yang dilakukannya juga untuk mendorong pemerintah dan perusahaan untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik.

Atas pencapaiannya selama memperjuangkan hak pekerja migran, Patima menjadi subjek dari film dokumenter "*Ghost Fleet*" yang ditayangkan di tahun 2019. Lewat film dokumenter tersebut, masyarakat dunia dapat menyaksikan bagaimana seorang aktivis perempuan bersama beberapa orang tim melakukan sebuah misi penyelamatan di pulau-pulau kecil Indonesia. Kasus *modern slavery* memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga perlu adanya penggunaan simbol dan cerita untuk bisa menyampaikan permasalahan yang sedang di hadapi. Melalui film dokumenter tersebut, penonton bisa memahami bagaimana sulitnya penegakan keadilan dan pembebasan para budak yang seringkali aktivis harus menghadapi hambatan seperti korupsi hingga ancaman pembunuhan.<sup>72</sup> Cerita yang dibawa dalam film ini akan memberikan perspektif baru dalam melihat upaya penyelamatan pekerja migran di pulau-pulau kecil yang sebelumnya belum pernah diperlihatkan.

<sup>71</sup> Seaweb Seafood Summit, 2018, *Champion Spotlight: Patima Tungpuchayakul*. Diakses dari <https://www.seafoodsummit.org/champion-spotlight-patima-tungpuchayakul/> pada 9 Desember 2019.

<sup>72</sup> Variety. 21 Februari 2019. *Film Review: Ghost Fleet*. Diakses dari <https://variety.com/2019/film/reviews/ghost-fleet-review-1203142027/> pada 9 Desember 2019

Cerita-cerita terkait sosok-sosok pekerja migran yang terdampak akibat adanya *modern slavery* juga disajikan di *website The Freedom Fund* yang juga merupakan aktor dan donor di dalam jaringan LPN. Salah satunya adalah Surachai

Mintun, seorang pekerja migran asal Myanmar yang memiliki pengalaman bekerja di sektor perikanan Thailand sebelum kemudian menjadi bagian dari LPN.

Sosok Surachai dilihat sebagai advokat berpengaruh diantara para pekerja migran yang berkontribusi dalam memberi layanan penerjemah untuk bahasa Myanmar.<sup>73</sup>

Selama bekerja di industri *seafood*, Surachai melihat kondisi rekan kerjanya dan tidak memiliki kemampuan untuk menolong mereka, oleh karena itu Ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan bergerak bersama LPN untuk menyelamatkan lebih banyak lagi pekerja.

### 5.3 *Leverage Politics*

Misi *transnational advocacy network* (TAN), jika dipahami melalui pola boomerang adalah mencari dukungan dari aktor-aktor internasional yang memiliki akses, kewenangan dan kekuatan yang lebih tinggi untuk mencapai perubahan kebijakan dari aktor target yaitu negara. LPN sebagai NGO lokal tidak memiliki pengaruh sebesar negara dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, LPN lebih banyak hadir dalam operasi lapangan dan advokasi di *level* domestik. Untuk itu LPN memanfaatkan aktor-aktor di dalam jaringan advokasi transnasionalnya dalam membawa misi advokasi kasus *modern slavery* ke ranah internasional.

Tujuannya agar bisa mendapat dukungan dari lebih banyak aktor internasional dalam memberi pengaruh dan tekanan ke pemangku kebijakan. Ada dua jenis

<sup>73</sup> The Freedom Fund, 28 November 2017, *Surachai Mintun's Story*. Diakses dari <https://freedomfund.org/blog/surachai-mintuns-story/> pada 9 Desember 2019.

pengaruh yang dapat diberikan oleh aktor TAN dalam mencapai tujuan yang dibawa yaitu pengaruh material dan pengaruh moral.

Pengaruh material dapat dibuktikan dengan adanya pemutusan kerjasama ekonomi, penghentian impor dan segala bentuk tekanan yang dapat mempengaruhi aktor target secara material. Menurut Keck dan Sikkink, dalam memperjuangkan isu HAM, aktor TAN seringkali mengkaitkan tuntutan penegakan HAM dengan memberikan ancaman militer maupun ekonomi.<sup>74</sup> EU adalah salah satu IGO paling berpengaruh di dunia sekaligus mitra dagang Thailand untuk produk *seafood*. Pemberitaan media, laporan, riset dan dokumentasi terkait kondisi pekerja di sektor perikanan Thailand menempatkan Thailand di dalam perhatian publik internasional. Untuk merespon keadaan sektor perikanan, pada 21 April 2015 EU mengeluarkan pernyataan sikap yang memberi ancaman tegas kepada pemerintah Thailand terkait minimnya efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam menangani masalah di sektor perikanan Thailand.

Sebagai bentuk komitmen EU dalam melawan *Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUU)* di seluruh dunia, EU sangat tegas terkait komitmennya menerapkan *zero tolerance* terkait produk-produk yang masuk ke pasar EU. Sejak tahun 2011, EU telah melakukan diskusi berkala terkait banyaknya pemberitaan dan laporan yang menunjukkan kondisi sektor perikanan Thailand. Hasil *monitoring* dari laporan dan fakta di sektor perikanan Thailand mendorong EU untuk menyatakan bahwa Thailand memiliki peran yang sangat terbatas dalam

<sup>74</sup> Keck, Margaret A. & Kathryn Sikkink. 1999. *Op Cit* pp 16

aspek pengawasan, kontrol dan sistem pemberian sanksi di sektor perikanan.

Terbukti dengan banyaknya hasil riset dan investigasi yang hanya membuka lebih banyak kasus di sektor perikanan, komitmen Thailand menjadikan upaya mengakhiri perdagangan manusia dan perbudakan sebagai agenda nasional kembali dipertanyakan, EU mengklaim upaya Thailand masih belum cukup.<sup>75</sup> EU memberikan waktu 6 bulan untuk pemerintah Thailand mengambil langkah tegas terkait masalah yang disebutkan.

EU dengan tegas menuntut pemerintah Thailand untuk bersama-sama mengeliminasi IUU *Fishing* dan ikut berjuang untuk melawan masalah-masalah di sektor perikanan. Melalui pernyataan sikap tersebut, EU mengancam akan mengeluarkan kartu kuning atau larangan terhadap impor produk *seafood* Thailand apabila pemerintah Thailand tidak segera mengambil langkah tepat dalam mendukung upaya global menghapus IUU.<sup>76</sup> Sebagai IGO yang mempromosikan IUU *Fishing*, EU dapat melihat perkembangan komitmen pemerintah Thailand melalui laporan dan pemberitaan media, termasuk fakta skandal Benjina yang berhasil dibongkar oleh jaringan LPN, menggunakan kekuatannya sebagai salah satu *market* terbesar dunia sekaligus mitra penting bagi perekonomian Thailand untuk menekan Pemerintah Thailand dalam memperbaiki sistem di sektor perikanan. Dalam hal ini, EU adalah salah satu aktor IGO di dalam TAN yang memiliki pengaruh secara material (dalam hal ekonomi)

<sup>75</sup> European Union, 21 April 2015, *EU acts on illegal fishing: Yellow card issued to Thailand while South Korea & Philipines are cleared*, diakses dari [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_15\\_4806](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_4806) pada 9 Desember 2019.

<sup>76</sup> European Union Press Release, 21 April 2015, *EU acts on illegal fishing: Yellow card issued to Thailand while South Korea and Phillipines are cleared*, Diakses dari [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_15\\_4806](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_4806) pada 20 Desember 2019.

sekaligus secara moral (*mobilizing shame*). Hingga batas waktu penelitian ini, EU belum menarik perungatan *yellow card* nya terhadap Thailand, meskipun Thailand sudah menyatakan komitmen sejak peringatan pertama EU di tahun 2015.

Selain EU, Amerika Serikat juga mengambil langkah tegas terkait kasus perbudakan yang terjadi di industri *seafood* Thailand dengan menandatangani *The Tariff Act 1930* yang berisikan akan menghentikan impor produk-produk yang dicurigai diproduksi dan dihasilkan dari perbudakan.<sup>77</sup> Kebijakan tersebut adalah peraturan lama yang jarang digunakan lagi oleh pemerintah Amerika Serikat, namun dibawah pemerintahan Presiden Obama, Amerika Serikat memiliki komitmen untuk mengeliminasi produk yang memiliki indikasi kejahatan HAM dan indikasi lainnya. Keputusan tersebut juga dilandasi oleh hasil operasi penyelamatan 3000 pekerja yang terperangkap di perairan Thailand dan Indonesia yang diinisiasi oleh LPN dan *Association Press*. Dari hasil investigasi skandal Benjina, sebagian besar produk hasil perbudakan dibawa ke supermarket-supermarket besar di Amerika Serikat.

*Moral leverage* atau pengaruh moral adalah pengaruh yang melibatkan *mobilization of shame* dimana jaringan mampu melibatkan aktor-aktor yang dapat memberi pengaruh secara moral. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan kemampuan untuk menyoroti perilaku maupun langkah yang diambil oleh aktor target dan memperlihatkan dalam bentuk salah benar. Dalam hal ini, setelah memberikan ancaman berupa kartu kuning, EU juga menyoroti perilaku Thailand yang dianggap buruk dalam mengatasi permasalahan di sektor perikanan. EU

<sup>77</sup> Association Press. 25 Februari 2016. *Obama bans US imports of slave produced goods*. Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/Obama-bans-US-imports-of-slave-produced-goods.html> pada 9 Desember 2019



mengkritisi cara Thailand yang terlalu lambat dalam merespon masalah dan tidak mampu menjamin efektivitas kebijakan dan program yang dibuatnya. Selain EU, Amerika Serikat juga menyoroti Thailand melalui *U.S Department of state's annual Trafficking in Persons Report*.

Sejak tahun 2014 Thailand telah dimasukkan ke dalam *tier 3* di dalam TIP Report 2014 akibat banyaknya praktik perdagangan orang yang terekspos. Melalui LPN, *U.S Department of States* melakukan pemantauan terkait perkembangan kebijakan dan juga kondisi pekerja di sektor perikanan. Pasca skandal Benjina, Pemerintah Thailand mengambil langkah tegas dengan memlakukan pemecatan terhadap kapten kapal dan beberapa pejabat yang terbukti terlibat dalam kasus perdagangan orang. Pemerintah Thailand juga menunjukkan determinasi dengan mempresekusi seorang perwira militer senior karena terbukti terlibat di dalam sindikat perdagangan orang.<sup>78</sup> Di tahun 2016 Thailand dinaikkan ke *tier 2 watch list* dan kemudian dinaikkan kembali ke *tier 2* akibat konsistensi pemerintah Thailand dalam melakukan upaya pemberantasan bagi segala bentuk tindak perdagangan orang.

*Mendapatkan* kecaman dari dua aktor paling berpengaruh menempatkan Thailand pada *spotlight* sehingga mau tidak mau harus mengambil tindakan dalam menyelesaikan kasus *modern slavery* di sektor perikananannya. Setelah adanya tekanan secara moral, jaringan akan melanjutkan tekanan tersebut dengan terus memberi peringatan kepada aktor target melalui *naming* dan *shaming*.

<sup>78</sup> The Nation Thailand, 29 Juni 2018, *US upgrades Thailand's status for anti-slavery efforts*.

#### 5.4 Accountability Politics

Untuk mencapai perubahan kebijakan, jaringan harus bisa meyakinkan aktor-aktor yang sudah menyatakan sikap untuk terus mendukung isu yang diangkat.<sup>79</sup> Taktik akuntabilitas politik dilakukan sebagai upaya untuk menjaga komitmen dari aktor-aktor yang ada di dalam jaringan dan juga aktor target. Sejak satu dekade terakhir Pemerintah Thailand menyatakan komitmen atas upaya mengeliminasi eksploitasi dan pelanggaran HAM yang diterima oleh pekerja di sektor perikanan. Junta militer Thailand juga menjanjikan akan menghapuskan segala tindak korupsi yang menjadi salah satu hambatan dari peningkatan kualitas lingkungan kerja di sektor perikanan. Namun pengambilan kebijakan yang kurang tepat mengakibatkan lambatnya penyelesaian masalah yang terjadi di sektor perikanan.

Thailand telah melakukan amandemen dan ratifikasi kepada beberapa regulasi dan perjanjian internasional, meskipun perbaikan terus dilakukan hingga tidak ada lagi korban perbudakan di sektor ekonomi Thailand manapun. Dari aktor-aktor yang berada dalam jejaring LPN, tidak ada perubahan yang bertolak belakang dari apa yang diperjuangkan. Sebagian besar aktor bergabung ke dalam jaringan LPN memang memiliki nilai-nilai dan tujuan yang sejalan sehingga aksi kolaboratif dan pertemuan berkala akan mampu menjaga keutuhan aktor yang ada di dalam jaringan. Selama kasus perbudakan modern masih terus terjadi, hubungan, komunikasi dan pertukaran informasi di dalam jaringan akan terus terjadi.

<sup>79</sup> Keck, Margaret A. & Kathryn Sinkkink. 1999. *Op Cit* pp 24

Aktor-aktor dengan misi dan fokus isu yang sama akan lebih mudah memberikan komitmen, sementara tantangan untuk jaringan adalah melakukan pengawasan terhadap aktor target berikut dengan aktor-aktor di bawahnya. Dalam aktivitasnya di skala lokal, jaringan LPN memiliki *community volunteer* yang disebut “*watchdog*”, mereka adalah pekerja migran yang telah dilatih untuk mengawasi tempat kerja masing-masing dan melaporkan ketika ada aktivitas kekerasan, pemaksaan ataupun bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya. bersama jaringan lokal melakukan pengawasan melalui laporan kasus dan kondisi lingkungan kerja yang terjadi di lapangan. LPN tidak hanya berjejaring kuat dengan aktor-aktor dalam skala internasional namun juga aktor domestik. Dalam melakukan aktivitas penyelamatan, LPN bekerjasama dengan pemerintah lokal dan polisi setempat untuk melakukan pertolongan pertama setiap muncul kasus baru.

Dalam skala internasional, ILO yang sudah berjejaring dengan LPN melakukan proyek *Ship to Shore Rights Project*, sebuah upaya pengawasan terhadap kondisi lingkungan kerja di sektor perikanan Thailand. Proyek tersebut mendapatkan pendanaan dari *European Union* dan menghasilkan beberapa penemuan diantaranya, berkurangnya laporan tentang kekerasan fisik, lebih sedikit pekerja dibawah umur, 43% dari nelayan sudah memiliki kontrak tertulis hingga 4 tahun, upah bulanan yang lebih tinggi bagi sebagian pekerja.<sup>80</sup> Selain itu, LPN beserta jaringan juga melibatkan diri dalam mengawasi program-program yang dibuat pemerintah Thailand.

<sup>80</sup> ILO. 2018. *Measuring progress towards decent work in Thai fishing and seafood industry*. Diakses dari [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_619724/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_619724/lang-en/index.htm) pada 9 Desember 2019.

Di tahun 2015, pemerintah Thailand dan *Command Center of Combating Illegal Fishing* (CCCIF) bersama 36 organisasi yang mencakup 12 agensi pemerintahan, 21 perusahaan *seafood* swasta dan 3 organisasi yaitu LPN, ILO dan EJF menandatangani MoU untuk melawan IUU dan *human trafficking* di sektor perikanan.<sup>81</sup> Hal tersebut membuka peluang bagi jaringan LPN untuk memantau program dan kebijakan pemerintah lokal terkait upaya menyelesaikan kasus-kasus *modern slavery*. CCCIF juga telah menyatakan akan melibatkan lebih banyak pihak di dalam programnya, membuat LPN memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberikan informasi dan rekomendasi.

Selain itu jaringan LPN juga aktif membuat pernyataan sikap, *press release* dan surat rekomendasi. Salah satu surat rekomendasi dari LPN bersama jaringan adalah *civil society statement* yang berisikan keresahan terkait implementasi dari *Protocol 2014 to the Forced Labour Convention 1930*.

Bersamaan dengan surat tersebut, LPN, aktor-aktor jaringan, individu dan institusi sepakat memberikan rekomendasi kepada *Royal Thai Government* dan Kementerian ketenagakerjaan Thailand setelah mengeluarkan *Forced Labour Act*.<sup>82</sup> Tuntutannya diantara definisi *Forced Labour* sebaiknya disesuaikan dengan definisi ILO dalam seluruh kebijakan yang dibuat Thailand kemudian melakukan penyesuaian pada hukuman yang berlaku sehingga sejalan dengan *Forced Labour*

*Protocol* yang baru diratifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa LPN, aktor-aktor di dalam jaringan LPN beserta aktor internasional lainnya melakukan

<sup>81</sup> Thailand TIP Report 2015. Pp 8

<sup>82</sup> Human Right Watch. 28 September 2018. *Joint Civil Society Statement concerning implementation of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930*. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2018/09/28/joint-civil-society-statement-concerning-implementation-protocol-2014-forced-labour> pada tanggal 20 November 2019.

pengawasan terhadap Thailand sehingga kasus yang diadvokasi benar-benar dapat diselesaikan.

### 5.5 Implikasi TAN terhadap Kebijakan Pemerintah Thailand

Selama bertahun-tahun Thailand terus mendapat kecaman dan kritikan terkait praktik *modern slavery* yang masih sering terjadi di sektor perikanan Thailand. Sebagian tekanan yang datang dari berbagai pihak merupakan dampak dari pola boomerang akibat jaringan yang dibentuk oleh LPN. Pada tahapan ini, segala bentuk tekanan yang diberikan akan menjadi landasan pengambilan kebijakan dan penentuan sikap dari aktor target. Jika dilihat sejak awal mula meledaknya istilah *modern slavery* ke ranah internasional yaitu tahun 2014- 2019 ada beberapa perubahan kebijakan yang diambil Thailand. Sebagai bentuk respon dari pemberitaan media di tahun 2014, terkait pengungkapan fakta praktik *slavery* dibalik industri *seafood* Thailand yang bernilai milyaran juga baht. Ada sekitar 280 kasus perdagangan orang yang tertangkap, diantaranya ada 8 orang pejabat (4 orang pejabat, 1 orang dari angkatan laut dan 2 orang dari pejabat lokal dan 1 orang lainnya dari petugas pengembangan sosial.

Sementara untuk merespon investigasi yang dilakukan oleh LPN dan *Association Press* terkait kasus penyelamatan di Benjina Indonesia, pemerintah Thailand telah mengerahkan *Department of Special Investigation* (DSI) dan *Royal Thai Police* untuk melakukan investigasi lebih lanjut di pulau Ambon dan sekitarnya. Pemerintah Thailand juga melakukan kunjungan bersama beberapa perwakilan dari kementerian untuk mengunjungi Ambon, Benjina dan Jakarta untuk menindaklanjuti kasus yang telah teridentifikasi. Perwakilan dari LPN juga

diikutsertakan untuk menyampaikan perspektif dari kelompok masyarakat.

Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari *Executive Director* dari LPN. Di bulan agustus, Pemerintah Thailand mendeklarasikan kebijakan *Zero Tolerance for Human Trafficking* sebagai landasan untuk menghapuskan segala bentuk eksploitasi terhadap pekerja,

Tabel 5.1 Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Thailand 2014-2018

<u>Area</u>	<u>Kebijakan</u>
<u>2015</u>	Amendemen <i>Fisheries Act B.E. 2490 (1947)</i> pada 9 Januari 2015
	Kementerian Ketenagakerjaan, <i>Ministerial Regulation Concerning Sea Fishing Worker Protection B.E. 2557 (2014)</i> pada 9-10 februari 2015
	<u>Amendemen <i>Anti-Human Trafficking Act B.E. 2551 (2008)</i> 27 Maret 2015</u>
<u>2016</u>	<i>Zero Tolerance Policy against Human Trafficking</i>
<u>2017</u>	Labour Protection Act (No.6) B.E. 2560. Pada 31 Agustus 2017
<u>2018</u>	Ratifikasi <i>Protocol 2014 of the Forced Labour Convention (P29)</i> pada 4 Juni 2018

Pada tahun 2018 Thailand melakukan ratifikasi terhadap *Protocol 2014 of the Forced Labour Convention (P29)* yang merupakan perubahan penting.

Thailand menjadi negara pertama di Asia yang meratifikasi konvensi tersebut dan



akan menjadi catatan bagi seluruh komponen sektor perekonomian Thailand, terutama di industri *seafood* bahwa kini Thailand menjadi bagian dari gerakan global untuk menghapus perbudakan.<sup>83</sup> Thailand merupakan negara ke-24 hyang meratifikasi protokol tersebut, menunjukkan komitmen Thailand dalam membersihkan perekonomiannya dari *modern slavery*.



<sup>83</sup> ILO. 4 Juni 2019. *Thailand joins the global movement to combat forced labour*. Diakses dari [https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS\\_631435/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_631435/lang--en/index.htm) pada 9 Desember 2019

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 KESIMPULAN

*Labor Rights Promotion Network* (LPN) sebagai aktor di dalam jaringan advokasi transnasional meraih keberhasilan dalam upaya melindungi pekerja dari *modern slavery* di sektor perikanan Thailand. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan sikap dan perubahan kebijakan Thailand yang ditandai dengan upaya kolektif yang semakin banyak dan penguatan landasan hukum yang mampu mendukung upaya tersebut. Salah satu upaya terbesar negara dari tahun 2014 – 2018 dalam menghapuskan *modern slavery* di sektor perikanan Thailand adalah dengan meratifikasi ILO *Forced Labour Convention* 2014. Keberhasilan aktor non negara dalam mempengaruhi kebijakan dapat dijelaskan sesuai dengan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs) milik Keck dan Sikkink. Untuk mengetahui strategi LPN bersama jaringan dalam upaya menghentikan *modern slavery* dapat dijelaskan melalui empat variabel utama yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics* dan *accountability politics*.

Strategi *Information Politics* merupakan strategi yang paling banyak dilakukan oleh LPN dan jaringannya dalam upaya mengadvokasi isu *modern slavery*. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya riset kolaboratif yang dilakukan LPN dan investigasi sekaligus operasi penyelamatan langsung yang dilakukan LPN bersama jaringannya. Dengan terjun langsung menangani kasus, LPN bersama jaringan memperoleh akses informasi berupa fakta, data, opini dan testimoni yang didapat dari korban, pekerja kapal dan narasumber terkait lainnya.



Informasi tersebut kemudian dibingkai dan dipublikasikan melalui situs internet sehingga dapat diakses oleh publik internasional.

Sesuai dengan temuan pada penelitian ini, LPN tidak banyak menggunakan strategi *Symbolic Politics* yang biasanya berkaitan dengan aksi simbolik seperti protes ataupun kampanye secara langsung mengingat kondisi pemerintah Thailand yang represif terhadap kegiatan aktivisme. LPN bersama jaringan lebih banyak menggunakan tokoh-tokoh yang diceritakan melalui media video dan artikel untuk menggambarkan isu yang diangkat melalui sosok heroik seperti Patima. Selain sosok heroik, sosok korban selamat juga diangkat ke dalam cerita-cerita dan laporan yang ditemui di lapangan mencakup kronologi, opini dan testimoni dari korban yang berhasil dipulangkan beserta pernyataan dari pihak terkait.

Strategi *Leverage Politics* adalah strategi paling efektif dalam upaya LPN bersama jaringannya mempengaruhi sikap dan kebijakan Thailand. Keterbatasan aktor non negara dalam bergerak dan melakukan *lobby* secara langsung membuat LPN beserta jaringan menggunakan kekuatan politik informasi untuk mendapat dukungan. Salah satu dukungan terbesar datang dari EU dan Amerika Serikat yang memiliki visi yang sama dalam melihat kondisi pekerja di sektor perikanan Thailand. Informasi yang telah dibingkai LPN bersama jaringan mendorong urgensi isu ke dalam agenda internasional sehingga secara tidak langsung mempengaruhi sikap EU dan Amerika Serikat sebagai dua aktor paling berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan global. Secara material kedua aktor tersebut sama-sama memberi ancaman *import ban* kepada Thailand,

memanfaatkan posisi mereka sebagai dua mitra dagang terbesar Thailand untuk produk *seafood*.

Strategi terakhir adalah *Accountability Politics*, LPN sebagai *pioneer* dari jaringan harus mampu menjamin konsistensi pemerintah Thailand dan aktor-aktor terlibat dalam menyelesaikan masalah *modern slavery* yang terjadi pada pekerja di sektor perikanan Thailand. Hal tersebut dapat dilihat dari komitmen LPN yang berusaha hadir di dalam upaya-upaya pengawasan jangka panjang. Bersama ILO dan EU, LPN terlibat dalam *ship to shore* project, yang akan mengawasi perkembangan sektor perikanan Thailand. LPN bersama ILO, EJF dan 36 aktor lainnya juga ikut menandatangani MoU penetapan CCCIF yang diinisiasi pemerintah Thailand untuk melawan IUU *Fishing* di sektor perikanan Thailand.

Dari keempat strategi advokasi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa, politik informasi adalah strategi utama yang digunakan LPN dalam memperkuat pengaruh jaringannya, sementara politik leverage adalah strategi yang berhasil merubah sikap pemerintahan Thailand. Hal ini membuktikan bahwa LPN sebagai NGO lokal yang memiliki keterbatasan dalam melakukan advokasi akibat kondisi politik domestik dan kemampuan anggota, ternyata memainkan peran penting dalam perubahan sikap dan kebijakan Thailand dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Thailand, negara pertama di ASEAN yang meratifikasi *Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention 1930*, menjadi puncak keberhasilan jaringan advokasi LPN dalam upaya menghapus *modern slavery* di sektor perikanan Thailand.

## 6.2 SARAN

Selama melakukan penelitian, penulis menyadari bahwa penelitian “strategi advokasi Labor Rights Promotion Network (LPN) dalam upaya menyelamatkan pekerja dari Modern Slavery di Industri perikanan Thailand di tahun 2013 – 2018” ini masih memiliki banyak kekurangan. Penulis memiliki beberapa saran kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat isu yang sama maupun menggunakan konsep yang sama dalam memahami strategi advokasi dari sebuah jaringan advokasi transnasional, adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- a. Penulis menyarankan dalam memahami isu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan aspek kedekatan fakta kondisi pekerja di sektor perikanan Thailand dengan peneliti sendiri karena kasus pelanggaran HAM yang terjadi di industri besar seperti industri perikanan Thailand memiliki dampak yang luas hingga kepada konsumennya. Ada kemungkinan kita dan orang-orang di sekitar kita bisa saja mengkonsumsi produk-produk perbudakan modern dan secara tidak langsung mendukung praktik *modern slavery* itu sendiri.
- b. *Modern Slavery* terjadi di hampir seluruh negara di dunia sehingga kasus-kasus perbudakan modern tidak hanya dapat diobservasi di sektor perikanan atau di negara Thailand saja namun juga banyak terjadi di negara dan sektor pekerjaan lain. Penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk memperluas pemahaman pembaca dan kajian hubungan internasional dengan membahas *modern slavery* yang terjadi di negara lain atau di sektor pekerjaan lain sebagai objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU &amp; DOKUMEN

Environmental Justice Foundation, 2013, *Sold to The Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*.

International Labour Organization, 2011, *Trafficking of Fishermen n Thailand*. Hal 17.

International Labour Organization. 2013. *Asian Research Center for Migration,*

*Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*. Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University- Bangkok. p.10

International Labour Organization. 2013. *Asian Research Center for Migration,*

*Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*. Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University- Bangkok. p.10

International Labour Organization. *Streghtening the global fight against all forms of forced labour*.

Keck, Margaret A. & Kathryn Sinkkink. 1999.

L.David Brown, Sanjeev Khagram, Mark H. Moore & Peter Frumkin, *Globalization, NGOs and Multi Sectoral Relations*, (Harvard University, 2000) hal. 2

Labour Migration and Human Trafficking. 2018. Pp 1

Rousenau, James, N, dan Czempiel, Ernst-Otto., (1992), *Governance without Government: Order and Change in World Politics*. Hal. 17

SEAFISH, 2015, *Thailand Ethics Profile*.

Thailand TIP Report 2015. Pp 8

Thai Anti-Human Trafficking Action, Hal 87.

The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance

U.S. Department of States, 2008, *TIP Heroes: Somong Sarakaew*.

U.S. Department of States, 2014, *Trafficking in Persons Report*. Hal 373

**JURNAL**

Arastri Putri Hartini, 2015. Keberhasilan Transnational Advocacy Network dalam Menekan

Multinational Corporation Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997–2001. *Jurnal Analisis*

Hubungan Internasional, Vol. 4. No.1, hal. 1423-1440

Mutaqin, Zezen, 2018, *Modern-day Slavery at Sea: Human Trafficking in the Thai Fishing Industry*. *Jurnal of East Asia and International Law*. Hal. 86.

**WEBSITE**

50 for Freedom. *A treaty to Change 25 Million Lives*. Diakses dari

<http://50forfreedom.org/the-protocol/> pada 9 Desember 2019.

*About Labour Rights Promonotion Networks*. Diakses dari

<https://www.lpnfoundation.org/about> pada 3 November 2019.

Advocacy's Place Within Social Work Practice, diakses dari

<https://www.mheducation.co.uk/openup/chapters/9780335243037.pdf> pada 20 Maret 2018

Anti-Trafficking in Persons Act 2008.

Associated Press, 1 Juli 2015, *Myanmar fisherman goes home after 22 years as a slave*.

Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/myanmar-fisherman-goes-home-after-22-years-as-a-slave.html> pada 15 Desember 2019.

Associated Press, 2015, *AP Investigation: Slaves may have caught the fish you bought*.

Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> pada 9 Desember 2019.

Associated Press, 2015, *Over 300 Slaves rescued from Indonesia Island after AP*

*Investigation into Forced Labour*. Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/over-300-slaves-rescued-from-Indonesia-island-after-ap-investigation.html> pada 15 Desember 2019.

Associated Press, 25 Maret 2015, *AP Investigation: Slaves may have caught the fish you bought*. Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html> pada 9 Desember 2019.

Association Press. 25 Februari 2016. *Obama bans US imports of slave produced goods*. Diakses dari <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/Obama-bans-US-imports-of-slave-produced-goods.html> pada 9 Desember 2019

Casting a Tight Net, diambil dari [https://ssir.org/articles/entry/casting\\_a\\_tight\\_net](https://ssir.org/articles/entry/casting_a_tight_net) diakses pada 18 Mei 2018

Casting a Tight Net, diambil dari [https://ssir.org/articles/entry/casting\\_a\\_tight\\_net](https://ssir.org/articles/entry/casting_a_tight_net) diakses pada 18 Mei 2018

CP Food Worldwide, 2017, *CPF urges migrant workers to speak up through a third party hotline*. Diakses dari <https://www.cpfworldwide.com/en/media-center/1056> pada 9 Desember 2019.

End Slavery Now. 4 Januari 2016. *Freedom from Slave Fishing Ship*. Diakses dari <https://www.endslaverynow.org/blog/articles/freedom-from-slave-fishing-ships> pada 20 Desember 2019.

European Union Press Release, 21 April 2015, *EU acts on illegal fishing: Yellow card issued to Thailand while South Korea & Philippines are cleared*. Diakses dari [https://ec.europa.eu/fisheries/eu-acts-illegal-fishing-yellow-card-issued-thailand-while-south-korea-philippines-are-cleared\\_en](https://ec.europa.eu/fisheries/eu-acts-illegal-fishing-yellow-card-issued-thailand-while-south-korea-philippines-are-cleared_en) pada 3 November 2019

European Union Press Release. 21 April 2015. *EU acts on illegal fishing: Yellow card issued to Thailand while South Korea and Phillipines are cleared*. Diakses dari [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_15\\_4806](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_4806) pada 20 Desember 2019.

European Union, 21 April 2015, *EU acts on illegal fishing: Yellow card issued to Thailand while South Korea & Philipines are cleared*. diakses dari [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_15\\_4806](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_4806) pada 9 Desember 2019.

*Human beings are not for sale*. Diakses dari <https://www.lpnfoundation.org/about> pada 5 November 2019

Human Right Watch, 28 September 2018. *Joint Civil Society Statement concerning implementation of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930*. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2018/09/28/joint-civil-society-statement-concerning-implementation-protocol-2014-forced-labour> pada tanggal 20 November 2019.

Human Rights Watch, 2015, *World Report: Thailand*. Diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/thailand> pada 3 November 2019

ILO. 2018. *Measuring progress towards decent work in Thai fishing and seafood industry*. Diakses dari [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_619724/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_619724/lang--en/index.htm) pada 9 Desember 2019.

ILO. 4 Juni 2019. *Thailand joins the global movement to combat forced labour*. Diakses dari [https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS\\_631435/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_631435/lang--en/index.htm) pada 9 Desember 2019

Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN). 2015. *The Special Report on Operations saving workers in fishing boats from Indonesia*. Diakses dari <https://lpnthailand.files.wordpress.com/2015/08/the-special-report-on-operations-saving-workers-in-fishing-boats-from-indonesia.pdf> pada 6 November 2019

Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN). Diakses dari [http://jica-cb-workshop.weebly.com/uploads/8/0/7/2/8072630/lpn\\_history\\_in\\_samutsakhon.pdf?fbclid=IwAR03lBmsnF5JKQKGb-jQNAB4EqSiowbB6Fo-FLda6HNdeAtn2uIVGOI8gwM](http://jica-cb-workshop.weebly.com/uploads/8/0/7/2/8072630/lpn_history_in_samutsakhon.pdf?fbclid=IwAR03lBmsnF5JKQKGb-jQNAB4EqSiowbB6Fo-FLda6HNdeAtn2uIVGOI8gwM) pada 5 November 2019

LPN Foundation. 2015. *A special Report on Operations saving workers in fishing boats from Indonesia*. Diakses dari <https://lpnthailand.files.wordpress.com/2015/08/the-special-report-on-operations-saving-workers-in-fishing-boats-from-indonesia.pdf> pada 5 November 2019

LPN Foundation. *A Report on Migrant Children & Child Labourers in Thailand's Fishing and Seafood Processing Industry*. Diakses dari <https://lpnthailand.files.wordpress.com/2017/04/a-report-on-migrant-children-child-labourers-2015.pdf> pada 7 November 2019

LPN Foundation. *Team*. Diakses dari <https://www.lpnfoundation.org/team> pada 9 Desember 2019

Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK, diakses dari <https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour> pada tanggal 20 Maret 2018

Seaweb Seafood Summit, 2018, *Champion Spotlight: Patima Tungpuchayakul*. Diakses dari <https://www.seafoodsummit.org/champion-spotlight-patima-tungpuchayakul/> pada 9 Desember 2019.

Thai Union, 2016, *Thai Union and LPN provide Labor Rights Booklet to Migrant Workers*. Diakses dari <https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/440/thai-union-and-lpn-provide-labor-rights-booklet-to-migrant-workers> pada 9 Desember 2019.

Thailand 2014 Human Rights Report, diakses dari <https://www.state.gov/documents/organization/236692.pdf> pada tanggal 5 Desember 2018

The Bangkok Post, 10 September 2019. Diakses dari <https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1746594/ending-slavery-with-the-right-strategy> pada 5 Desember 2019.

The Bangkok Post, 2 April 2015, *Thailand, two Asean countries investigate fishing slavery reports*. Diakses dari <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/516423/thailand-two-asean-countries-investigate-fishing-slavery-reports> pada 15 Desember 2019.

THE Fish Site, 17 Juni 2014, *Thailand Opposes International Efforts to Tackle Forced Labour*. Diakses dari <https://thefishsite.com/articles/thailand-opposes-international-efforts-to-tackle-forced-labour> pada 9 Desember 2019.

The Freedom Fund, 28 November 2017, *Surachai Mintun's Story*. Diakses dari <https://freedomfund.org/blog/surachai-mintuns-story/> pada 9 Desember 2019.

The Freedom Fund, 2015. Diakses dari <https://freedomfund.org/partners/labour-rights-promotion-network-foundation/> pada 9 Desember 2019

The Guardian, 10 Juni 2014, *Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK*. diakses dari <https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour> pada 20 Maret 2018



The Guardian, 25 Februari 2015. *Slavery and trafficking continue in Thai fishing industry, claim activists* diakses dari <http://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/25/slavery-trafficking-thai-fishing-industry>

The Nation Thailand, 2018, *Migrants in Mahachai live in fear of police extortion*. Diakses dari <https://www.nationthailand.com/national/30357621> pada 9 Desember 2019.

The Nation Thailand, 2018, *Schooling offers bright future for migrants*. Diakses dari <https://www.nationthailand.com/national/30358975> pada 9 Desember 2019.

US Department of State. *What is Modern Slavery?.* Diakses dari <https://www.state.gov/what-is-modern-slavery/#forced> pada 2 November 2019

Variety, 21 Februari 2019. *Film Review: Ghost Fleet*. Diakses dari <https://variety.com/2019/film/reviews/ghost-fleet-review-1203142027/> pada 9 Desember 2019

<http://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/25/slavery-trafficking-thai-fishing-industry>

Simmons, Jane J. 2003. *Human Security and Thai NGO & Governmental Roles*, diambil dari [http://www.aulibrary.au.edu/multim1/ABAC\\_Pub/ABAC-Journal/v23-n1-7.pdf](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/ABAC_Pub/ABAC-Journal/v23-n1-7.pdf) diakses pada 15 mei 2018

